

**PERENCANAAN TERPADU
PADA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENERANGAN
PROPINSI SULAWESI SELATAN**



BOSOWA
OLEH

MAZHATY KAHAR

STB : 4586020106

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk
Menempuh Ujian Sarjana Negara
Jurusan Administrasi Negara

P a d a

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS "45" UJUNG PANDANG**

1 9 9 1

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : PERENCANAAN TERPADU PADA KANTOR-
WILAYAH DEPARTEMEN PENERANGAN RI
PROPINSI SULAWESI SELATAN.

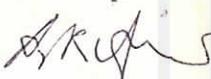
Nama Mahasiswa : MAZHATY KAHAR

Nomor STB / NIRM : 4586020106 / 871133146

MENYETUJUI

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. H. Anwar Arifin

Drs. Guntur Karnaeni

MENGETAHUI

Dekan Fisipol
Universitas "45"

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi



Drs. H. Muhammad Thala

Prof. Drs. H. Sadly AD, MPA

Tanggal Pengesahan : 1991

KATA PENGANTAR

Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, akhirnya karya tulis/skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan segala suka dan duka.

Dalam skripsi ini, penulis mencoba menggambarkan sejauhmana proses pelaksanaan perencanaan terpadu pada Kantor Wilayah Departemen Penerangan RI Propinsi Sulawesi Selatan. Dari kesimpulan yang penulis peroleh menunjukkan bahwa perencanaan terpadu yang telah dilakukan setiap diadakan perencanaan operasional tidaklah berjalan sesuai apa yang diharapkan, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: faktor manusia (aparatur yang terlibat dalam perencanaan tersebut) yang masih kurang kesadaran berorganisasi, terutama aparat dari instansi non Deppen (kerabat kerja Deppen). Faktor penyebab lain adalah dana dan fasilitas yang kurang mendukung. Demikian pula sistem koordinasi yang masih perlu pemikiran ulang.

Melalui skripsi ini penulis memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu

penulis dalam menyelesaikan pendidikan di Universitas "45". Mereka itu antara lain: .

1. Pembimbing Pertama Bapak Prof.Dr.H.Andi Anwar Arifin dan Pembimbing Kedua Drs.Guntur Karnaeni yang bersedia meluangkan waktunya membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Penerangan Propinsi Sulawesi Selatan Bapak Jusuf Saman,BA., Kepala Bidang Bidang Penyusunan Program dan Evaluasi Drs. Calvin Lumba dan seluruh staff Kanwil Deppen Propinsi Sulsel yang bersedia menerima dan memberikan informasi/data kepada penulis.
3. Rektor Universitas "45" dan para pembantunya, Dekan FISIPOL Universitas "45" dan para pembantunya.
4. Ketua Jurusan Ilmu Adminstrasi Drs.H.Sadly AD,MPA dan Sekertaris Jurusan Drs.Mastam Ladeng.
5. Bapak/Ibu dosen dan seluruh staf administrasi di FISIPOL Universitas "45".
6. Orang tua penulis yang dengan penuh ketabahan membimbing

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kerangka Konseptual	4
E. Metode Penelitian	10
1. Tipe penelitian	
2. Populasi dan sampel	
3. Teknik pengumpulan data	
4. Pengolahan dan analisa data	
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II : KAJIAN PUSTAKA	14
A. Arti Pentingnya Perencanaan	14
B. Pengertian Penerangan	17

C. Penerangan dan Perencanaan Terpadu..	20
1. Penerangan terpadu	20
2. Perencanaan Terpadu	22
D. Perencanaan Operasional Penerangan .	24
E. Faktor-Faktor Perencanaan	29
BAB III : GAMBARAN UMUM KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN	
PENERANGAN RI PROP. SULAWESI SELATAN .	31
A. Kedudukan, Tugas Dan Fungsi DEPPEN .	31
1. Kedudukan DEPPEN.	31
2. Tugas dan fungsi DEPPEN.	32
B. Struktur Organisasi dan Uraian	
Tugas Deppen	36
C. Kegiatan Operasional Penerangan	
Kantor Wilayah Departemen Penerangan	
Propinsi Sulawesi Selatan	41
1. Keadaan geografis dan demografis	
Sulawesi-Selatan	41
2. Aparat kanwil DEPPEN	42
D. Garis - garis Besar Program	
kerja 1990 / 1991	45
BAB IV : SISTEM PERENCANAAN PENERANGAN TERPADU	
PADA KANTOR WILAYAH DEPPEN. RI PROPINSI	
SULAWESI SELATAN	55
A. Sistem Perencanaan	57

1. Tahap persiapan	
2. Tahap penentuan rencana	
B. Masalah - masalah yang berhubungan dengan perencanaan terpadu	74
1. Kurangnya kordinasi dalam penyusunan rencana	74
2. Terbatasnya pengetahuan dan keterampilan perencanaan	83
3. Keterbatasan sarana dan fasilitas kerja	85
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran-saran	88
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN-LAMPIRAN	94

B A B I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Untuk mencapai sasaran yang diharapkan dalam suatu organisasi dan manajemen, diperlukan perencanaan yang matang. Apabila rencana tidak ditetapkan terlebih dahulu, berarti organisasi tersebut akan mengalami hambatan dan penyimpangan-penyimpangan sehingga akan menimbulkan kerugian. Rencana yang tidak terarah akan menimbulkan kerugian semata-mata. Tujuan organisasi merupakan dasar rencana kerja. Tanpa rencana, pekerjaan akan mengambang, terombang ambing, sehingga akan mengakibatkan hilangnya rasa tanggung jawab, tidak ada disiplin kerja, saling melaporkan kesalahan dan kegagalan.

Karena pentingnya perencanaan (*planning*) ini berbagai pakar dalam merumuskan fungsi organik manajemen menempatkan fungsi perencanaan sebagai urutan yang paling atas. Henry Fayol misalnya mengemukakan fungsi manajemen adalah *planning, organizing, commanding, coordinating, controlling*. George R. Terry juga mengemukakan bahwa fungsi manajemen adalah *planning, organizing, actuating, coordinating, dan controlling* (Sarwoto, 1985). Demikian pula pakar Administrasi dan manajemen Indonesia Prof. Dr. S. P. Siagian (1985:102) dalam

bukunya *Filsafat Administrasi* membagi fungsi manajemen: perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan dan penilaian.

Hal ini menunjukkan bahwa setiap kegiatan administrasi dan manajemen haruslah didahului dengan *perencanaan* baru kemudian dilakukan fungsi-fungsi administrasi dan manajemen lainnya.

Dengan adanya perencanaan, diharapkan terdapatnya suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksana kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan organisasi. Dengan adanya perencanaan sebagai pedoman, maka selain akan memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan secara sistimatis dan logis, juga sekaligus dapat dijadikan kerangka evaluasi, sehingga masalah yang timbul dilapangan dapat dengan segera diketahui selanjutnya dijadikan masukan untuk perencanaan selanjutnya.

Departemen Penerangan RI yang juga merupakan suatu lembaga, tidak terlepas dari penerapan fungsi-fungsi manajemen yang juga melakukan perencanaan sebelum diadakan kegiatan operasional.

Kantor Wialayah Departemen Penerangan RI Propensi Sulawesi Selatan sebagai unit pelaksana teknis operasional Departemen Penerangan yang juga tidak terlepas sebagai suatu organisasi dan sebagai instansi yang menjuru bicarai semua instansi pemerintah, maka Departemen Penerangan sebe-

lum melakukan tugas-tugas operasionalnya juga memerlukan masukan dari masing-masing instansi pemerintah di luar lingkungannya.

Karena adanya kerjasama dengan instansi di luar lingkungannya, maka diperlukan adanya pendekatan perencanaan terpadu. Jika koordinasi kurang memadai, maka perencanaan terpadu ini nantinya tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Demikian pula dengan proses perencanaan jika tidak diatur sedemikian rupa, kemungkinan akan terjadi *miscommunication* yang pada gilirannya akan mengakibatkan *mismanagement*.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas sehingga penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji secara ilmiah tentang perlunya peningkatan kualitas operasional penerangan melalui pendekatan perencanaan terpadu pada unit kerja Kantor Wilayah Departemen Departemen Penerangan Propensi Sulawesi Selatan.

B. Batasan dan Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sejauhmana pelaksanaan sistem perencanaan terpadu pada kantor wilayah Deppen RI Propensi Sulawesi Selatan.
2. Program-program apa saja yang telah dilaksanakan dari perencanaan terpadu tersebut.

3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses perencanaan terpadu tersebut.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem perencanaan terpadu yang dilaksanakan oleh Departemen Penerangan khususnya Kanwil Deppen RI Propinsi Sulawesi selatan.
- b. Untuk mengetahui program-program apa saja dari perencanaan terpadu tersebut.
- c. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi dalam proses perencanaan terpadu tersebut.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan atau dalam perumusan kebijaksanaan operasional kegiatan Departemen Penerangan.

D. Kerangka Pemikiran

1. Perencanaan

Jika kita berangkat dari teori administrasi, maka

administrasi dapat dipandang dari dua segi, yaitu dari segi kegiatan dan dari segi proses. Administrasi dari segi kegiatan biasa juga disebut fungsi organik administrasi dan manajemen (Siagian 1985: 25). Sedangkan administrasi dalam arti proses dapat dilihat dari segi mekanisme, prosedur, atau tata urutan kerja.

Yang dimaksud fungsi organik administrasi dan manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan, serta penilaian. (Siagian, 1985:102).

Dari kelima fungsi organik di atas, maka penulis memilih unsur yang pertama sebagai fokus kajian yaitu "perencanaan".

Perencanaan sebagai objek kajian dapat diteliti dari berbagai aspek, apakah dari perilaku perencana, hasil perencanaan, pelaksanaan rencana (implementasi) dan sebagainya. Dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah proses perencanaan dan faktor-faktor yang berpengaruh dalam proses perencanaan tersebut.

Menurut Anwar Arifin (1982:11) bahwa "proses" merupakan perubahan atau serangkaian tindakan dan peristiwa selama beberapa waktu menuju suatu hasil tertentu. Jadi jika dihubungkan dengan perencanaan, maka setiap langkah sedemikian rupa sehingga perencanaan selesai dan siap untuk dilaksanakan, itulah yang disebut proses.

Sedangkan perencanaan dapat diartikan penentuan

langkah-langkah/kegiatan yang akan dilaksanakan di masa akan datang. Penentuan langkah-langkah tersebut akan diperhatikan: *apa yang hendak dilaksanakan, mengapa mesti dilaksanakan, bagaimana melaksanakannya, kapan dilaksanakan, dan dimana dilaksanakan.*

Sedangkan Bidang perencanaan yang akan diteliti pada Kantor Wilayah Departemen Penerangan Propinsi Sulawesi Selatan adalah kegiatan operasional penerangan, seperti Pertunjukan Rakyat, Ceramah, Pembinaan Kelompencapir, penerbitan bulletin dan sebagainya.

2. Proses Perencanaan

Seringkali terdapat kesalahpahaman, seakan-akan perencanaan berarti kegiatan penyusunan rencana saja. Padahal perencanaan yang dimaksud adalah suatu proses kegiatan yang terus menerus dan menyeluruh dari penyusunan suatu rencana, penyusunan program kegiatan, pelaksanaan serta pengawasan dan evaluasi pelaksanaannya. (Tjokroamidjojo, 1989: 57).

Drs.A.W.Widjaja (1987:49-56) menulis, bahwa proses perencanaan dapat dilihat urutan sebagai berikut :

- a. Pengumpulan dan pengolahan data
- b. Penilaian
- c. Perumusan kebijaksanaan
- d. Kebutuhan masa depan
- e. Pembiayaan
- f. Penentuan target/sasaran

- g. Formulasi perencanaan
- h. uraian perencanaan
- i. Implementasi proyek
- y. Evaluasi dan pemantauan
- k. Revisi dan penyusunan kembali rencana

Jadi proses perencanaan secara garis besar dapat dilihat dalam tiga tahap, yaitu penyusunan rencana, pelaksanaan rencana, serta pengawasan dan evaluasi rencana.

Proses penyusunan rencana menurut Bintoro Tjokroamidjojo (1989:57-58) adalah:

- a. Tinjauan keadaan, yaitu identifikasi masalah-masalah pokok yang sedang dihadapi, potensi-potensi serta prospek yang masih bisa dikembangkan.
- b. Perkiraan keadaan masa yang akan dilalui rencana sering disebut *forcasting*. Dalam hal ini diperlukan data-data statistik, berbagai hasil penelitian dan teknik-teknik proyeksi. Mekanisme informasi untuk mengetahui kecenderungan perspektif masa depan.
- c. Penentuan tujuan rencana dan pemilihan cara-cara penyampaian tujuan rencana tersebut. Secara teknis hal ini didasarkan kepada tujuan keadaan dan perkiraan masa yang akan dilalui oleh rencana.
- d. Identifikasi kebijaksanaan dan kegiatan usaha yang

perlu dilakukan dalam rencana. Suatu kebijaksanaan mungkin perlu didukung oleh program-program pembangunan untuk dapat lebih operasionalnya, rencana kegiatan usaha ini perlu dilakukan berdasarkan pemilihan alternatif yang terbaik. Hal ini dilakukan berdasarkan skala prioritas.

- e. Persetujuan rencana. Proses pengambilan keputusan ini mungkin bertingkat-tingkat dari putusan dibidang teknis kemudian memasuki wilayah proses politik.

3. Penerangan dan Perencanaan Terpadu

Penerangan dalam pengertian universal, adalah sebagaimana yang dimaksud *information* dalam bahasa Inggris. Jadi dengan demikian penerangan adalah penyampaian pernyataan-pernyataan dari fakta-fakta semata. Pengertian penerangan, khususnya di Indonesia mengalami suatu transformasi, telah diartikan bukan saja dapat memberikan efek, tetapi juga dampak yang menjurus kepada suatu kondisi masyarakat. Sebagaimana yang diharapkan oleh etos nasional itu sendiri (Kertapati, 1984:25-26).

Pengertian penerangan terpadu dapat dilihat dari dua segi, yaitu dari segi isi dan dari segi penanganannya. Keterpaduan dalam isi ialah keterpaduan penerangan sektoral dan penerangan lintas sektoral. Keterpaduan dalam penanganannya ialah dalam kaitannya diantara unit kerja baik yang ada

dalam organisasi di Departemen Penerangan maupun yang ada di luar Departemen Penerangan atau sering disebut "kerabat kerja penerangan".

Bagaimanapun juga keterpaduan disini diartikan bahwa semua jajaran penerangan sesuai dengan batas kewenangannya dari saat perencanaan, pelaksanaan sampai pada tingkat pengawasannya harus terlibat atau berperan aktif dalam proses:

- a. Pengambilan suatu keputusan atau kebijaksanaan
- b. Perumusan rencana suatu kegiatan
- c. Pelaksanaan suatu kegiatan

Tanpa keterpaduan dalam penyampaian pesan kepada masyarakat, dapat menimbulkan kebingungan, atau kejenuhan informasi karena kurangnya kesatuan informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Dan tatkala pentingnya, tercegahnya pemborosan.

Penerangan secara fungsional menjadi tanggung jawab Departemen Penerangan. Namun dalam kenyataan sehari-hari ada instansi pemerintah lainnya serta organisasi non pemerintah yang juga melakukan kegiatan penerangan. Jadi jelaslah betapa perlunya diterapkan asas keterpaduan ini.

Dihubungkan dengan kegiatan penerangan, maka penerangan terpadu adalah penerangan yang dilakukan dengan koordinasi, sinkronisasi disegala tingkat, berdasarkan

rencana yang jelas yang dirumuskan atau masukan yang konkrit yang diperoleh dari semua unsur yang berhubungan.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif*. Menurut Whitney dalam bukunya *The Elements of Research* (Nazir, 1985:63) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tatacara yang berlaku dalam masyarakat, situasi-situasi tertentu termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.

Secara harafiah, metode deskriptif adalah metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian sehingga metode ini berkehendak mengadakan akumulasi data dasar belaka.

Jadi tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistimatis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diteliti.

2. Populasi dan sampel

Populasi daripada penelitian ini adalah seluruh pegawai Kantor Wilayah Departemen Penerangan Propensi Sulawesi Selatan yang berjumlah 1.736 orang.

Teknik sampling yang digunakan adalah *Purposive Sample*. Oleh karenanya yang menjadi sampel yang dipilih adalah pegawai-pegawai yang ada pada Bidang Penyusunan Program dan Evaluasi yang terdiri dari Seksi Himpunan dan Pengolahan Bahan Penerangan, Seksi Penyusunan Rencana dan Operasi dan Seksi Evaluasi dan Laporan Daerah.

Secara rinci yang menjadi responden dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Kepala Bidang Penyusunan Program dan Evaluasi
- b. Kepala Seksi Himpunan dan Pengolahan Bahan Penerangan
- c. Kepala Seksi Penyusunan Rencana dan Operasi
- d. Kepala Seksi Evaluasi dan Laporan Daerah

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah interview (wawancara) dengan terbuka, namun tetap menggunakan pedoman wawancara (pokok-pokok masalah yang akan ditanyakan). Disamping itu penulis telah mengambil (menyalin) beberapa dokumen seperti peraturan-peraturan, instruksi-intruksi yang berhubungan dengan topik penelitian ini.

4. Pengolahan dan analisa Data

Data yang telah dikumpulkan (hasil wawancara dan data skunder) kemudian diolah dengan cara mensistimatisasi dan dianalisa secara kualitatif.

F. Sistematika Penulisan

Sekripsi ini terdiri atas lima bab yang kemudian masing-masing dibagi ke dalam beberapa subbab.

Bab Pertama merupakan Bab Pendahuluan yang memuat gambaran singkat tentang materi pokok skripsi ini yang terdiri atas uraian sub-sub bab: latarbelakang masalah, perumusan dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab Kedua adalah Tinjauan Pustaka yang memuat pengertian-pengertian, teori-teori, konsep-konsep tentang penerangan dan perencanaan terpadu. Secara rinci bab ini terdiri atas sub-sub bab sebagai berikut: arti pentingnya perencanaan, arti pentingnya penerangan, penerangan dan perencanaan terpadu, perencanaan operasional penerangan dan faktor-faktor perencanaan.

Bab Ketiga merupakan bab pelengkap yang memuat gambaran umum Kantor Wilayah Departemen Penerangan RI Propensi Sulawesi Selatan. Bab ini terdiri atas sub-sub bab: kedudukan Tugas dan fungsi Deppen, Struktur organisasi dan uraian tugas, kegiatan operasional penerangan Kanwil Deppen Propensi Sulawesi Selatan dan garis-garis besar program kerja Kanwil Deppen Propinsi Sulsel.

Bab Keempat yang merupakan bab hasil penelitian dan analisa data yang memuat pengumpulan dan analisa data. Bab ini terdiri atas proses perencanaan terpadu, bentuk-bentuk program dan faktor-faktor perencanaan terpadu.

Bab Kelima merupakan bab pembahasan yang paling akhir yaitu kesimpulan dan saran-saran. Dibagi dua subbab sebagai berikut: kesimpulan dan saran-saran.



B A B II

KAJIAN PUSTAKA

A. Arti Pentingnya Perencanaan

Para pakar telah menelaah masalah perencanaan ini dengan meninjau berbagai aspek, ada yang meneliti dari perilaku perencana, proses perencanaan, hasil perencanaan, implementasi, hubungan rencana dengan pengawasan dan sebagainya.

Sedangkan dari segi waktu perencanaan dapat diteliti dengan membagi perencanaan jangka panjang (10 tahun ke atas), perencanaan jangka menengah (3 - 8 tahun), dan perencanaan jangka pendek (1 - 2 tahun) (Tjokroamidjojo, 1989: 71). Selanjutnya, Tjokroamidjojo (1989:73) menjelaskan dalam bukunya *Perencanaan Pembangunan* mengenai perencanaan jangka pendek sebagai penelitian ini yakni:

"... rencana jangka pendek adalah rencana tahunan (*annual plan*). Rencana tahunan ini adalah suatu rencana jangka panjang sebagai penterjemahan dari pada rencana menengah supaya lebih bersifat konkrit, spesifik dan operasional tahunan (*annual operasional plan*)"

Apakah yang disebut "rencana" ? Rencana adalah penentuan tentang apa saja yang akan dikerjakan di masa yang akan datang. Sedangkan "Perencanaan" menurut S.P. Siagian

(1981:106), "Perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang dari pada hal-hal yang akan dikerjakan dimasa yang akan datang"

Drs. A.W.Widjaya (1987 : 33) mengemukakan; bahwa planning (perencanaan) adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang tentang apa yang akan dikerjakan dimasa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Perencanaan diartikan sebagai usaha sadar untuk memikirkan alternatif-alternatif yang mungkin dapat dicapai pada masa depan, menyaji alternatif tersebut dan memilih alternatif yang dikehendaki agar dapat ditentukan pula bagaimana cara mencapainya.

Secara rinci oleh Bintoro Tjokroamidjojo (1989:12) menguraikan :

- a. Perencanaan dalam arti seluas-luasnya tidak lain adalah suatu proses mempersiapkan secara sistimatis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Oleh karena itu pada hekekatnya ter-dapat pada tiap-tiap jenis pemerintahan.
- b. Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya (maximun out put) dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif.
- c. Perencanaan adalah penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang akan dilakukan, bagaimana, bilamana dan oleh siapa."

Harold Koontz dalam bukunya *Essential of Management* (1989 : 129 - 136) membagi langkah-langkah perencanaan sebagai berikut :

- Langkah pertama : Menyadari kesempatan, yaitu melihat dengan jelas dan lengkap apa kekuatan dan kelemahan kita, memahami masalah-masalah yang hendak dipecahkan dan apa yang hendak diperoleh.
- Langkah kedua : Menetapkan tujuan, yaitu menetapkan kemana kita ingin pergi, apa yang ingin dicapai.
- Langkah ketiga : Mengembangkan pokok-pokok pendapat, yaitu dalam lingkungan apa (internal atau eksternal) rencana kita akan beroperasi.
- Langkah keempat : Menentukan jalan-jalan alternatif
- Langkah kelima : Alternatif apa yang paling memberikan harapan bagi tercapainya tujuan.
- Langkah keenam : Memilih suatu jalan tindakan, yaitu memilih alternatif yang paling baik untuk dijadikan tindakan yang akan ditempuh.
- Langkah ketujuh : Merumuskan rencana-rencana penunjang seperti pembelian dan pengadaan suku cadang, penjadwalan, pembiayaan dan sebagainya.
- Langkah kedelapan : Menjabarkan rencana kedalam angka-angka dengan budget, yaitu rencana-rencana

yang telah diambil dijabarkan dengan mengubahnya menjadi anggaran.

Menurut tingkat perencanaan, maka dibedakan siapa dan bagaimana perencanaan itu harus dibuat sebagai berikut :

1. Perencanaan kebijaksanaan (*policy planning*) dibuat oleh manajemen puncak.
2. Perencanaan Program (*program planning*) dibuat oleh manajemen tengah.
3. Perencanaan operasional (*operational Planning*) dibuat oleh manajemen bawah.

Apabila struktur ini dihubungkan dengan Departemen Penerangan, maka penjabatannya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perencanaan kebijaksanaan dibuat oleh pimpinan departemen (menteri).
2. Perencanaan program dibuat oleh direktur Jenderal.
3. Perencanaan operasional dibuat oleh kepala kantor wilayah bersama unit-unit kerjanya termasuk kantor departemen penerangan kabupaten dan kotamadya.

B. Arti Pentingnya Penerangan

Astrid S.Susanto (1977 : 6) yang mengatakan, bahwa penerangan adalah usaha manusia hidup bersama (bermasyara-

kat) untuk memindahkan idenya dari pihak satu kepada pihak yang lain dengan menjelaskan maksud dan tujuannya.

Sejalan pengertian yang dikemukakan oleh Susanto tersebut, Anwar Arifin (1982) mengemukakan pula bahwa penerangan adalah kegiatan komunikasi. Sedangkan yang dimaksud komunikasi adalah proses saling membagi atau menggunakan informasi secara bersama dan bertalian antara para peserta dalam proses informasi. Jadi secara sederhana penerangan disamakan dengan yang dimaksud informasi atau komunikasi yaitu proses penyampaian ide/pesan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.

Dalam perkembangan selanjutnya, tampaknya pengertian penerangan bukan sekedar informasi, melainkan mengandung tiga unsur yaitu :

1. Unsur informasi,
2. Unsur edukasi,
3. Unsur persuasi atau ajakan yang meyakinkan (Soedikio, 1985 : 13)

Dengan demikian pengertian penerangan adalah kegiatan komunikasi yang berisi keterangan-keterangan, pendapat-pendapat, gagasan-gagasan ataupun kebijakan pemerintah dengan maksud menjelaskan, mendidik, dan mempengaruhi disertai pesan atau anjuran agar yang diberi penerangan bersedia bersikap dan bertindak sesuai harapan yang memberi penerangan.

Didalam konstalasi kenegaraan, di mana pemerintah memegang peran aktif dalam pembinaan masyarakat, antara lain melalui penerangan, maka tidak lepas dari pada landasan falsafah Pancasila, maka penerangan pemerintah dihayati oleh landasan-landasan kerja meliputi :

- "a. Usaha penerangan (*to enlighten*) secara faktual dan juga objektif.
- b. Usaha mendidik.
- c. Mengajak serta memberikan uluran tangan.
- d. Membimbing, dan
- e. Sekaligus mengarahkan kepada tujuan yang dicita-citakan bersama" (Kertopati, 1984 : 30)

Demikianlah kenyataan penerangan dalam praktek yang dilaksanakan oleh Departemen Penerangan sebagai salah satu dari unsur pemerintahan diferensiatif (berbeda-beda) didalam bidang tugasnya, yaitu antara lain sebagai sarana untuk mendorong semangat serta membangkitkan gairah masyarakat untuk bersama-sama dengan pemerintah menuju kepada cita-cita nasional, dengan melalui program nasional.

Oleh karena itu tugas atau kedudukan penerangan di Indonesia dengan sengaja penulis mempertegas dengan maksud untuk lebih mendapatkan dan sekaligus memperjelas kedudukan historis dan tata laku operasionalnya.

Tugas Departemen Penerangan di Indonesia pada dasarnya dapat dibagi atas dua kelompok, masing-masing :

1. Tugas pokok;
2. Tugas khusus.

Tugas pokok Departemen Penerangan sebagaimana yang dirumuskan dalam keputusan Presiden RI No. 45 Tahun 1974 ialah "Menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang penerangan".

Dalam hubungan dengan hakekat pembangunan di Indonesia seperti yang ditetapkan dalam GBHN, bahwa tugas pokok tersebut dalam penjabarannya mencakup empat fungsi utama.

1. Memantapkan pembinaan kesatuan, persatuan dan jiwa bangsa.
2. Mensukseskan pembangunan nasional melalui Repelita.
3. Menggalang ketahanan nasional bagi terwujudnya stabilitas nasional.
4. Tugas-tugas khusus yang beruang lingkup nasional"

Tugas khusus Departemen Penerangan ialah tugas-tugas yang bersifat khusus dengan ruang lingkup nasional seperti: Bimas, Pemilihan Umum, Keluarga Berencana, Tahun Kunjungan Indonesia 1991 dan sebagainya.

C. Penerangan dan Perencanaan Terpadu

1. Penerangan Terpadu

Pengertian penerangan secara garis besar telah diuraikan di atas, maka yang perlu diberi pengertian disini adalah "Terpadu" (*Integrated*) dan apa yang dimaksud "Penerangan Terpadu".

Terpadu berarti memadukan atau menyatukan dua atau lebih kegiatan sehingga tercipta keserasian dan kesatuan gerak langkah.

Memperhatikan pengertian di atas, maka "Penerangan

Terpadu" adalah sistem penerangan yang dilakukan dalam hal ini oleh Departemen Penerangan sedemikian rupa sehingga terwujud keserasian dan kesatuan gerak langkah dalam setiap usaha/kegiatan penerangan. Oleh karenanya prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi perlu diperhatikan.

Menurut Drs. Ton Kertopati (1984 : 114) dalam bukunya *Menajemen Penerangan* mengemukakan :

"Penerangan Terpadu dapat dilihat dari dua segi, yaitu dari segi isi dan dari segi penanganannya. Keterpaduan dalam segi isi adalah keterpaduan penerangan sektoral dan penerangan lintas sektoral. Keterpaduan dalam penanganan ialah dalam kaitannya diantara unit kerja di lingkungan Departemen Penerangan sendiri dan terpadu dengan unsur lainnya di luar Departemen Penerangan"

Dari pendapat ini dapat dilihat adanya tiga jalur keterpaduan dalam kaitannya dengan proses operasional penerangan, yaitu :

1. Keterpaduan di dalam lingkungan Departemen Penerangan sendiri.
2. Keterpaduan Departemen Penerangan dengan unsur penerangan pemerintah lainnya.
3. Keterpaduan Departemen Penerangan dengan unsur penerangan yang ada dalam masyarakat.

Untuk lebih menjamin terwujudnya keterpaduan kegiatan penerangan dari berbagai unsur seperti diuraikan di atas, perlu adanya pola operasional penerangan yang menyangkut :

1. Latar belakang masalah.
2. Tujuan Penerangan.
3. Materi Penerangan.
4. Pemilihan dan penggunaan media penerangan.
5. Koordinasi yang ketat.

Dengan adanya penerangan terpadu seperti diuraikan di atas akan dapat dihilangkan, setidaknya-tidaknya memperkecil pemborosan yang disebabkan karena kesimpansiuran komunikasi. Untuk itu perlu dimantapkan sistem penerangan terpadu yang mementingkan terciptanya koordinasi dan sinkronisasi di segala tingkatan.

Bagaimanapun juga keterpaduan disini berarti semua jajaran penerangan, sesuai dengan batas kewenangannya dari satu perencanaan sampai pada tingkat pengawasan harus terlibat dalam proses :

1. Pengambilan suatu keputusan atau kebijaksanaan.
2. Perumusan rencana atau kegiatan.
3. Pelaksanaan suatu kegiatan.

2. Perencanaan Terpadu

Sekarang timbul pertanyaan, apa yang hendak dicapai dari perencanaan terpadu itu ?

Untuk menjawab pertanyaan diatas tentunya tidak terlepas dari uraian-uraian di atas, yaitu mewujudkan suatu pola operasional penerangan. Adalah suatu kebijaksanaan

yang ironi apabila pada tingkat operasional yang dicanangkan keterpaduan gerak, sementara pada tingkat perencanaan tetap berjalan sendiri-sendiri. Karena itu gagasan perencanaan terpadu yang dikembangkan Departemen Penerangan mutlak diperlukan adanya perencanaan yang terpadu pula.

Mengapa pula perlu adanya perencanaan terpadu? Terhadap pertanyaan ini secara singkat dapat dijawab bahwa perencanaan terpadu adalah sebagai alat atau cara untuk mencapai tujuan dengan lebih baik, melalui suatu pola kerjasama yang integral antara satu pihak dengan pihak lainnya, demi mewujudkan kebersamaan dalam pemikiran dan kesamaan di dalam implementasi.

Dengan perencanaan terpadu diharapkan :

- a. Adanya pengarahan suatu kegiatan secara terpadu.
- b. Memungkinkan dilakukannya perkiraan terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui secara terkoordinir.
- c. perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara ataupun kombinasi yang terbaik dalam mencapai tujuan melalui suatu perumusan bersama.
- d. dengan perencanaan terpadu dilakukan penyusunan skala prioritas masing-masing pihak yang terlibat dalam program dan terpadu dalam suatu pola.
- e. Dengan adanya rencana terpadu maka dapat diukur dan

diawasi secara bersama apakah pelaksanaan sesuai dengan rencana atau tidak.

Meskipun pelaksanaan kegiatan penerangan telah diawali dengan perencanaan yang terpadu dan teliti, namun kesempatan terjadinya hal-hal yang menghambat selalu saja timbul, oleh karena itu perencanaan terpadu bukanlah jaminan untuk tercapainya tujuan organisasi secara efisien dan efektif, akan tetapi masih terbuka kesempatan untuk melakukan perbaikan-perbaikan.

D. Perencanaan Operasional Penerangan

Operasional adalah suatu proses kegiatan yang berupaya secara berencana dan bertahap untuk mewujudkan suatu tujuan dengan kebijaksanaan dan strategi yang telah ditetapkan.

Jika dihubungkan dengan perencanaan, maka perencanaan operasional tahunan adalah suatu penterjemahan secara lebih konkrit, spesifik dan operasional dari rencana jangka menengah secara tahunan. Rencana ini tetap berpegang kepada tujuan-tujuan, kebijaksanaan-kebijaksanaan, prioritas dari pada rencana jangka menengah. Penyesuaian-penyesuaian secara tahunan dimungkinkan berdasar tinjauan pelaksanaan rencana sebelumnya, perkembangan keadaan serta perkiraan keadaan masa rencana yang akan dilalui serta informasi-informasi baru yang tidak didapatkan sebelumnya.

Perencanaan operasional tahunan juga mengaitkan dengan erat antara perencanaan program-program dan proyek-proyek tahunan dengan perencanaan jangka menengah serta penyusunan anggaran belanja negara. Hal ini juga menunjukkan akan sifat operasionalnya rencana ini. Seringkali bahkan pengkaitan antara rencana program dan proyek tahunan dengan penyusunan anggaran merupakan embrio daripada suatu perencanaan operasional tahunan yang lengkap.

Unsur-unsur yang perlu ditetapkan dalam perencanaan operasional tahunan ini :

- "a. Kegiatan-kegiatan apa yang perlu dilakukan.
- b. Siapa yang melakukan kegiatan-kegiatan tersebut terdahulu. Penting pula adalah tata hubungan kerja antara masing-masing.
- c. Jadwal waktu pelaksanaan kegiatan yang perlu dilakukan.
- d. Bentuk atau hasil daripada kegiatan-kegiatan yang dilakukan" (Tjokroamidjojo, 1989 : 163)

Perencanaan operasional tahunan ini amat membutuhkan kerjasama yang serasi antara berbagai badan pemerintahan yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Terutama hal ini harus dilakukan antara badan perencanaan pusat dan badan penyusunan anggaran belanja negara. Perencanaan operasional tahunan merupakan a *unifying element* dalam perencanaan pembangunan.

Dihubungkan dengan implementasi perencanaan operasional yang ada di Departemen Penerangan, juga diterapkan perencanaan operasional.

Dalam pengertian manajemen, program adalah suatu rencana yang dibatasi oleh adanya penyediaan waktu, prasarana, anggaran, tenaga. Dengan demikian program operasi penerangan ditentukan untuk setiap tahun kerja, secara berkesinambungan. Program operasi penerangan ditujukan untuk mencapai sasaran penerangan yaitu kondisi mental masyarakat yang makin baik selaku insan Pancasila dan insan pembangunan.

Program operasi itu terdiri atas perincian program yang di dalamnya memuat penggunaan daya dan dana.

Program operasi penerangan dipergunakan sebagai pedoman bagi unit-unit teknis penerangan, mencakup:

1. Program operasi penerangan yang sudah dapat dijadwalkan sehubungan dengan adanya peristiwa-peristiwa penting berkaitan dengan hari bersejarah, hari peringatan pada setiap tahun yang kesemuanya erat sekali dengan pembinaan jiwa bangsa., misalnya:

- Hari Kebangkitan Nasional,
- Hari Sumpah Pemuda,
- Hari Proklamasi Kemerdekaan,
- Hari Pahlawan,
- Hari Pendidikan Nasional,
- Hari Kartini,

- Hari Kesaktian Pancasila,
dan hari-hari besar lainnya.

Kesemuanya merupakan tonggak sejarah yang setiap tahun harus dimanfaatkan secara baik untuk menggelorakan jiwa dan semangat persatuan dan kesatuan serta patriotisme bangsa, dikaitkan dengan tingkat kemajuan pembangunan.

2. Program operasi penerangan yang direncanakan setiap tahun kerja dapat diperkirakan ada beberapa hal yang memerlukan prioritas perhatian umum.

Untuk jangka waktu yang paling panjang seperti masalah:

- Pangan,
- Sandang,
- Papan (perumahan),
- Pendidikan,
- Kesehatan,
- Lapangan kerja,
- Kependudukan dan Keluarga Berencana,
- Transmigrasi,
- Koperasi,
- Peranan wanita dan Pemuda
- Penggunaan hasil Industri dalam negeri,
- Pariwisata,
- Lingkungan hidup,
- Kesadaran Hukum dan Disiplin Nasional,

- Pertahanan dan Keamanan,
 - Pemasyarakatan P-4,
- dan lain-lainnya.

Program Operasi Penerangan harus disesuaikan dengan kebijaksanaan nasional agar secara tepat dan terarah dapat memilih prioritas permasalahan yang akan menjadi subjek penerangan.

Program Operasi Penerangan yang direncanakan ini dapat berbentuk rangkaian kegiatan sebagai berikut:

- Kampanye Nasional
- Kampanye Regional
- Kampanye Lokal

Pola-pola kampanye dalam kaitannya dengan ruang lingkup sasaran khalayak, materi, penggunaan media dan sistem koordinasi dirumuskan dalam petunjuk pelaksanaan.

3. Program Operasi Penerangan Khusus.

Tidak semua peristiwa dapat diketahui atau diperkirakan sebelumnya. Untuk menghadapi pendadakan peristiwa yang memerlukan penerangan perlu dipersiapkan perangkat yang dengan segera menjadi tim yang mampu bergerak cepat untuk beroperasi secara khusus dalam waktu tertentu.

Tim ini terdiri atas gabungan unsur-unsur yang berasal dari unit-unit yang ada secara terkoordinasi dan terpadu.

Program Operasi Penerangan disusun berdasarkan materi pokok penerangan yang telah ditetapkan. Penyajiannya dijabarkan dalam bentuk kegiatan penerangan lewat radio, televisi, film, pers, pameran, pertunjukan rakyat ataupun penerangan tatap muka dengan kualitas yang makin meningkat.

Hal ini penting untuk menghindari kemungkinan kejelehan masyarakat dan menghilangkan kesan seakan-akan penerangan hanyalah kegiatan rutin dan pengulangan-pengulangan yang kering dari daya kreasi, sedangkan akibat hasil pembangunan kehidupan masyarakat telah lebih maju.

2. Faktor-faktor perencanaan

Dengan merangkaikan hubungan antara suatu rencana yang baik dengan proses perencanaan itu sendiri, maka untuk menyusun suatu rencana yang baik diperlukan beberapa faktor sebagai berikut:

1. Suatu rencana hendaknya disusun oleh tenaga yang benar-benar mengetahui teknik perencanaan.
2. Rencana harus dibuat oleh orang yang mendalami tujuan organisasi.
3. Rencana harus didukung oleh data/informasi, ide-ide yang relevan.
4. Rencana hendaknya disusun oleh orang mengetahui sifat hakiki daripada permasalahan serta mampu melihat kedepan.

(Widjaja, 1987:38-39)

Suatu rencana yang telah disusun tentu diharapkan akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan organisasi. Pada dasarnya perencanaan itu lebih mudah dipahami dari pada digunakan dan dilaksanakan. Beberapa hambatan penggunaan dan pelaksanaan perencanaan sering terjadi yang datangnya baik dari dalam maupun dari organisasi itu sendiri. Hambatan dari dalam misalnya belum tersedia ahli perencanaan yang profesional, belum tersusunnya data-data yang reliabel dan akurat, belum jelas cara-cara dan pencapaian tujuan.

Hambatan dari luar misalnya disebabkan terbatasnya dana yang diperlukan adanya ketentuan-ketentuan yang harus dikaitkan dan memerlukan pemikiran, dan pengarah waktu, situasi, kondisi lingkungan. Masalah yang demikian kadang-kadang membuat seorang perencana menjadi kecewa dan sebenarnya ini tidak perlu terjadi.

BAB III

GAMBARAN UMUM KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENERANGAN REPUBLIK INDONESIA PROPENSI SULAWESI SELATAN

A. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DEPPEN

1. Kedudukan Deppen

Dalam perjalanan perjuangan bangsa dan negara dan untuk mempertahankan, menegakkan dan mengisi kemerdekaan ini, Departemen Penerangan mempunyai kedudukan dan peranan yang tidak kalah pentingnya dengan departemen lain. Kedudukan dan eksistensi Departemen Penerangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai alat perjuangan bangsa merupakan kenyataan sejarah tersendiri, karena peranan yang diberikan dari masa ke masa sejak berdirinya Republik Indonesia, sampai saat ini yaitu untuk mengisi kemerdekaan melalui pembangunan nasional.

Di dalam pengaturan tata kerja kabinet, Departemen Penerangan termasuk di dalam bidang politik dan keamanan. Namun bila dipandang dari segi teknis operasional, Departemen Penerangan adalah penyelenggara penerangan yang mencakup seluruh bidang dan sektor yang ada dalam kabinet. Oleh karenanya Departemen Penerangan dengan seluruh jajarannya termasuk Kantor Wilayah Departemen Penerangan Pro-

pinsi Sulawesi selatan menjadi juru bicara semua instansi dan pemerintah Daerah, dengan melaksanakan kegiatan penerangan sesuai dengan situasi dan kondisi daerah setempat.

Sebagai aparatur pemerintah yang bertugas khusus dibidang penerangan, maka Departemen Penerangan berkedudukan sebagai pembina, pembimbing serta pemberi izin sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Tugas dan Fungsi Deppen

Dalam hubungannya dengan pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, baerdaulat, bersatu dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis serta dalam lingkungan dan tata pergaulan dunia yang damai, maka tugas-tugas penerangan adalah menumbuhkan sikap mental masyarakat untuk mendukung dan menyukseskan pembangunan.

Berdasarkan Pedoman Penerangan Tahun 1983-1988, ditegaskan:

"Penerangan bagi pembangunan nasional Indonesia jelas mempunyai peranan yang sangat penting. Penerangan harus mampu menyalurkan pengertian-pengertian yang terkandung dalam kebijaksanaan pembangunan dalam proses pembangunan masyarakat Indonesia yang serba majemuk, yang mengalami perubahan-perubahan yang amat cepat" (Deppen RI, 1988:5)

Berdasarkan uraian tersebut, maka kedudukan Departemen Penerangan sebagai penanggung jawab fungsional tugas-tugas penerangan tidak terlepas dari tugas pokok Departemen Penerangan. Tugas pokok Departemen Penerangan, sebagaimana dirumuskan dalam Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 1974 ialah : "Menyelenggarakan sebagian tugas Umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang Penerangan".

Untuk dapat lebih memantapkan pelaksanaan tugas pokok Departemen Penerangan, dalam penjabarannya, sebagai berikut:

1. Memantapkan pembinaan kesatuan, persatuan dan jiwa bangsa.
2. Menyukseskan Pembangunan Nasional melalui Repelita.
3. Menggalang Ketahanan Nasional bagi terwujudnya stabilitas nasional.
4. Tugas-tugas khusus yang beruanglingkup Nasional" (Penjabaran Tugas Pokok Deppen)

Sejalan dengan tugas pokok dan kedudukan serta fungsi Departemen Penerangan, maka Kantor Wilayah Departemen Penerangan Propinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menyelenggarakan fungsi koordinatif di daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Kantor Wilayah Departemen Penerangan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar organisasi dalam lingkungan Departemen, serta dengan unit kerja penerangan, yakni unsur penerangan/kehu-

masan pemerintah dan yang ada dalam masyarakat (non pemerintah).

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, bahwa Departemen Penerangan yang berbentuk "Integrated Type" maka:

- "a. Di tingkat propinsi, para kepala kantor wilayah Departemen Penerangan adalah koordinator dari seluruh jajaran Departemen Penerangan di Daerah Tingkat I
- b. Ditingkat Kabupaten/Kotamadya, para Kepala Kantor Departemen Penerangan adalah koordinator dari seluruh jajaran Departemen Penerangan di Daerah Tingkat II. (Keputusan Menpen RI/1988)

Berdasarkan pasal 649 Surat Keputusan Menteri Penerangan RI Nomor; 55B/KEP/MENPEN/ 1975 juncto Surat Keputusan Menpen RI Nomor: 230 A/KEP/MENPEN/1984 tentang: Organisasi dan Tata Kerja Departemen Penerangan., Kantor Wilayah Departemen Penerangan Propinsi Sulawesi Selatan mempunyai tugas pokok dan fungsi Departemen Penerangan di wilayah yang bersangkutan.

Selanjutnya dikemukakan untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, sesuai pasal 695 Kantor Wilayah Departemen Penerangan mempunyai fungsi untuk:

- "a. Menyelenggarakan pengaturan dari Pimpinan terhadap pelaksanaan operasi penerangan yang disalurkan melalui media penerangan pemerintah, baik media komunikasi massa maupun tradisional.
- b. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penerangan langsung terhadap masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan serta penyelenggara hubungan kerjasama dengan unsur penerangan masyarakat dan unsur pemuka masyarakat.
- c. Memberikan bimbingan, pengarahan dan pengendalian kegiatan penerangan yang dilakukan oleh Kantor

Departemen Penerangan Kabupaten/Kotamadya dan Pusmenmas.

- d. Menampung masalah gejolak/pendapat masyarakat di wilayah masing-masing untuk diteruskan kepada pimpinan Departemen Penerangan sebagai laporan arus balik.
- e. Melakukan pembinaan dan pengamatan terhadap kegiatan penerangan yang dilakukan oleh lembaga komunikasi massa non pemerintah di bidang keradioan, pertelevisian, perfilman dan persuratkabaran" (Deppen RI, 1975)

Dengan demikian fungsi koordinatif Kantor Wilayah Departemen Penerangan Propinsi Sulawesi Selatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi Departemen Penerangan, berorientasi pada upaya makin meningkatkan dan memperluas volume dan dimensi operasional. terutama dalam rangka memantapkan kerangka landasan bagi pelaksanaan pembangunan nasional.

Untuk menyukseskan kegiatan penerangan di daerah Sulawesi Selatan, sebagai patokan kegiatan adalah "Panca Tekad Penerangan", yakni lima kemauan keras untuk menyukseskan kegiatan dan mendorong semangat serta tekad berpenerangan. Rumusan Panca tekad Penerangan sebagaimana disampaikan Menteri Penerangan RI, H.Harmoko pada tanggal 29 April 1984, dalam Penutupan Rapat Paripurna Departemen Penerangan RI, yang merupakan instruksi kepada jajaran Departemen Penerangan baik Pusat maupun Daerah. Panca Tekad Penerangan yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan keterpaduan gerak langkah operasi penerangan dengan sistem yang dijiwai oleh watak dan semangat Pancasila baik ke dalam maupun ke luar, sesuai dengan petunjuk-petunjuk operasional yang terdapat dalam pedoman penerangan.
2. Meningkatkan tegaknya semangat pengabdian, disiplin kerja dan wibawa penerangan, terutama yang menyangkut manusia, isi penerangan dan lembaganya.
3. meningkatkan terus kemampuan penerangan dengan mendayagunakan segala sarana, prasarana dan aparatur penerangan secara terpadu dan terarah dengan tetap membina kewaspadaan nasional.
4. Meningkatkan keakraban dan kesetiaan sesama aparatur dan kerabat kerja penerangan, baik dalam lingkungan pekerjaan maupun di luar kedinasan untuk lebih berhasilnya pelaksanaan tugas-tugas penerangan.
5. Meningkatkan keterbukaan dan keakraban dengan masyarakat luas, secara aktif terjun kelapangan dengan tetap menggunakan pendekatan yang persuasif, edukatif, dan informatif untuk menggolongkan semangat dan menggairahkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional" (Deppen RI, 1988)

Melalui Panca Tekad Penerangan tersebut, diharapkan dapat menanamkan pengertian kepada seluruh masyarakat secara sadar memberikan dukungan dan peran serta secara aktif terhadap setiap kebijaksanaan pemerintah.

B. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Deppen

Struktur organisasi adalah kerangka menyeluruh dari-pada suatu organisasi yang menghubungkan fungsi-fungsi, pembagian kerja, wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing bagian/badan usaha atau orang yang terlibat dalam proses pencapaian tujuan. (Sutarto, 1987:84)

Selain dari pada itu, struktur organisasi ditinjau dari fungsinya, adalah alat yang dipergunakan oleh pimpinan

untuk memudahkan pengendalian, pengawasan dan pengorganisasian terhadap unit/anggota atau setiap dalam organisasi tersebut agar dapat mengetahui secara kongkrit tugas, wewenang dan tanggung jawabnya.

Struktur organisasi dan hubungan kerja Kanwil Deppen Propinsi Sulawesi Selatan, tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Penerangan RI Nomor: 55B/KEP/MENPEN/ 1975 juncto Surat Keputusan Menpen RI Nomor: 230 A/KEP/MENPEN/1984 tentang: Organisasi dan Tata Kerja Departemen Penerangan.

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana dikemukakan di atas, maka Kantor Wilayah mempunyai perangkat organisasi yang terdiri atas:

- a. Bagian Umum
- b. Bidang Penyusunan Program dan Evaluasi
- c. Bidang Pers dan Penerbitan
- d. Bidang Hubungan dan Penerangan Masyarakat
- e. Bidang Koordinasi Media Penerangan
- f. Bidang Pembinaan Kegiatan Penerangan Daerah

ad. a. Bagian Umum mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi kepada unsur-unsur di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Penerangan di propinsi.

Untuk menyelenggarakan tugas-tugas tersebut, Bagian Umum mempunyai fungsi :

- (1) Menyelenggarakan urusan tata usaha Kantor Wilayah.
- (2) Melakukan pengurusan tata usaha kepegawaian, baik yang didasarkan kepada pembinaan karier maupun kepada segi-segi kesejahteraan umum.
- (3) Melakukan pengelolaan anggaran/keuangan, baik anggaran rutin maupun anggaran pembangunan serta mengelola materiil/benda milik kantor wilayah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bagian Umum dibantu oleh seksi-seksi yang terdiri atas:

1. Subbagian Tata Usaha
2. Subbagian Kepegawaian
3. Subbagian Keuangan
4. Subbagian Perlengkapan

ad. b. Bidang Penyusunan Program dan Evaluasi mempunyai tugas untuk menyusun rencana dan program secara menyeluruh serta melakukan evaluasi terhadap hasil-hasil yang dicapai oleh pelaksanaan penerangan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bidang Penyusunan Program dan Evaluasi dibantu oleh seksi-seksi yang terdiri atas:

1. Seksi Himpunan dan Pengolahan Bahan Penerangan.
2. Seksi Penyusunan Rencana Operasi Penerangan.
3. Seksi Evaluasi dan Laporan Daerah.

ad. c. Bidang Pers dan Penerbitan, mempunyai tugas Untuk:

- (1) Menyelenggarakan penerangan melalui media penerangan dan meneliti penerbitan-penerbitan non pera sebagai unsur komunikasi sosial.
- (2) Mengadakan hubungan kerjasama yang bersifat membina agar pers dan penerbitan-penerbitan lainnya dapat berperan positif dalam pembangunan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bidang Pers dan Penerbitan dibantu oleh seksi-seksi yang terdiri atas:

1. Seksi Penerbitan Umum
2. Seksi Pengamatan Pers dan Pendapat Umum
3. Seksi Dokumentasi dan Perpustakaan Daerah

ad. d. Bidang Hubungan dan Penerangan Masyarakat mempunyai tugas untuk melakukan penerangan langsung terhadap sasaran utama masyarakat kota, pemuka-pemuka masyarakat dan golongan masyarakat dengan melalui ceramah, anjongsana dan menjalin kerjasama dengan masyarakat dibidang penerangan dengan melalui kesenian daerah, pertunjukan rakyat serta pameran.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bidang Hubungan dan Penerangan Masyarakat dibantu oleh seksi-seksi yang terdiri atas:

1. Seksi Hubungan Masyarakat
2. Seksi Ceramah dan Diskusi
3. Seksi Pertunjukan Rakyat
4. Seksi Pameran

ad. e. Bidang Koordinasi Media Penerangan mempunyai tugas untuk mengadakan pengamatan terhadap kegiatan penerangan melalui radio, televisi, dan film serta akibat yang ditimbulkan dalam masyarakat serta mengadakan pembinaan siaran penerangan melalui media elektronik dan film dalam satu koordinasi yang serasi.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bidang Koordinasi Media Penerangan dibantu oleh seksi-seksi yang terdiri atas:

1. Seksi Siaran Radio
2. Seksi Siaran Televisi/Film
3. Seksi Foto dan Lukisan

ad. f. Bidang Pembinaan Kegiatan Penerangan Daerah mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan pengembangan dan dan pengarahan kegiatan operasional penerangan di kabupaten/kotamadya dan pedesaan serta memberi partisipasi instansi-instansi pemerintah, swasta dan masyarakat pada kegiatan-kegiatan penerangan yang

terarah dalam satu koordinasi, integrasi dan sinkronisasi yang serasi.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bidang Pembinaan Kegiatan Penerangan Daerah dibantu oleh seksi-seksi yang terdiri atas :

1. Seksi Pembinaan Kegiatan Pembinaan Daerah
2. Seksi Pembinaan Penerangan Langsung
3. Seksi Pembinaan Mobile Unit

Adapun susunan struktur organisasi Kantor Wilayah Departemen Penerangan Propinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada lampiran 1.

C. Kegiatan Operasional Penerangan Kantor Wilayah Departemen Penerangan Propinsi Sulawesi Selatan

1. Keadaan Geografis dan Demografis Sulsel

Kegiatan Operasional penerangan yang dilaksanakan jajaran Kantor Wilayah Departemen Penerangan Propinsi Sulawesi Selatan, diarahkan dalam rangka mendukung dan menyukseskan pelaksanaan Pembangunan yang dialokasikan di daerah Sulawesi Selatan.

Sasaran khalayak atau audience Deppen adalah masyarakat yang berada di daerah Sulawesi Selatan dengan segala latar belakang, karakteristik sosial budaya yang heterogen.

Sedang daerah sasaran penerangan adalah daerah Sulawesi Selatan berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : dengan Propinsi Sulawesi Tengah
- Sebelah Timur : dengan Teluk Bone dan Sulawesi Tenggara
- Sebelah Selatan : dengan Laut Flores
- Sebelah Barat : dengan Selat Makassar.

Luas Wilayah daerah Propinsi Sulawesi Selatan mencapai: 62.482,54 Km², yang terdiri atas 2 kotamadya, 21 kabupaten, 1 Kota Administratif dan terdiri atas: 178 kecamatan, 1.237 desa/kelurahan.

Jumlah penduduk Sulawesi Selatan menurut hasil Registrasi penduduk tahun 1989 (Kantor Statistik Propinsi Sulawesi Selatan) berjumlah 6.731.236 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk diperkirakan 1,26%.

Ditinjau dari segi Penyebaran penduduk dapat dilihat bahwa 12,18 % dari seluruh penduduk di Sulsel berada di Kotamadya Ujung Pandang yang luas daerahnya hanya 0,28 % dari luas daerah Sulsel. Keadaan ini menyebabkan Ujung Pandang merupakan daerah tingkat II yang terpadat di Sulawesi Selatan. Sebaliknya Kabupaten Mamuju yang mempunyai luas 7 % dari luas Sulsel hanya berpenduduk 2,30 dari seluruh penduduk yang ada.

2. Aparat Kanwil Deppen

Jumlah pegawai Kanwil Deppen dan Kantor Departemen Penerangan Kabupaten/Kotamadya se Sulawesi Selatan sebagai

pelaksana Operasional penerangan sebanyak 1.736 orang yang terinci menurut golongan, sebagai berikut :

- Golongan I = 107 pegawai
- Golongan II = 1.166 pegawai
- Golongan III = 466 pegawai
- Golongan IV = 17 pegawai

Jika dirinci dari jenis pendidikan, maka komposisinya adalah sebagai berikut :

- Sekolah Dasar : 78 pegawai
- S L T P : 127 pegawai
- S L T A : 1.121 pegawai
- Sarjana Muda : 199 pegawai
- Widyaswara : 1 pegawai
- Jupen Fungsional : yang diusulkan 422 pegawai
Kab/Kotamadya : Sk. Terbit 328 pegawai

Untuk meningkatkan bobot operasional penerangan akan dilaksanakan pembinaan dan peningkatan pengetahuan, keterampilan dan pembentukan sikap mental setiap aparat penerangan, baik melalui diklat teknis maupun melalui diklat jenjang karier, sebagai berikut :

Tabel 01

**PENINGKATAN PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN
PEGAWAI DEPPEN SULSEL**

No.	Diklat Jupen Lokal	Jumlah Peserta
1	2	3
1	Diklat PPSD	155
2	Diklat Pelaporan	5
3	Diklat Jupen Lokal	656
4	Diklat Kepegawaian	3
5	Diklat Lokal Jupen Territorial	20
6	Diklat TOT/TOC	4
7	Diklat Kewartawanan (PPKJ) Kerjasama UNHAS - DEPPEN	3
8	Diklat Fotografer	2
9	Diklat Kameraman	8
10	Diklat Manajemen Proyek Perencanaan	1
11	Diklat Pameran	8
12	Diklat Pertunjukan Rakyat	8
13	Diklat Protokol	8
14	Diklat Jupen Luar Negeri	1
15	Diklat Pengawasan Keuangan Negara Tipe C (Ditjen Keuangan Oleh BPKP Perwakilan Sulsel)	2
16	Diklat Pemantapan Pengetahuan Keprotokolan (Lokal)	30
17	Latihan Pemantapan Perencanaan/ ketata usahaan/Keuangan lokal	69

1	2	3
18	Latihan Pemantapan Pertunjukan Rakyat Versi Bagong (Lokal)	125
19	S e p p a d a	90
20	S e p a l a	90
21	S e s p e n II	
22	Peserta Pra Jabatan Tingkat I	-
	Tingkat II	122
	Tingkat III	79
23	Penataran Sadar Wisata	24
24	Penataran Andal	1
25	Terpadnas	2
26	Pekan Orientasi	150

Sumber : Program Kerja Kanwil Deppen Prop. Sulsel
Tahun Anggaran 1990/1991

D. Garis Besar Program Kerja 1990/1991

Sesuai Instruksi Kepala Kantor Wilayah Departemen Penerangan RI Propinsi Sulawesi Selatan No.38/Inst/SS/K/1989 tanggal 1 April 1989 (lihat lampiran 02), yang diinstruksikan kepada para Kepala Bidang/Bagian dilingkungan Departemen Penerangan Propinsi Sulawesi Selatan. Isi instruksi ini menggambarkan tahapan persiapan penyusunan/pengolahan program kerja tahunan, triwulan, dan bulanan.

Adapun isi instruksi tersebut antara lain :

Pertama ; Kepada para Kepala Bidang/Bagian di Lingkungan Kantor Wilayah Departemen Penerangan RI Propinsi Sulawesi Selatan, mulai 1 April 1989:

a. Menyiapkan secara rutin setiap tahap penyusunan/pengolahan program kerja Tahunan, Triwulan, Bulanan, bahan-bahan masukan menurut tugas dan fungsi masing-masing unit/satuan kerja.

b. Untuk Program Kerja Tahunan 1989/1991, input data diterima paling lambat tanggal 15 April 1989, untuk program kerja triwulan I, II, III, dan IV selambat-lambatnya diterima tanggal 5 triwulan yang bersangkutan, dan program kerja bulanan, diterima tanggal 8 setiap bulan.

Kedua ; Untuk terwujudnya kesatuan gerak yang serasi, maka bahan-bahan masukan dalam rangka penyusunan program, mutlak dibahas secara hirarkhi antara bagian dengan subbagian, dan antara bidang dengan seksi, yang pada akhirnya dibahas dalam forum Konsultasi Kanwil Deppen Propinsi Sulawesi Selatan.

Ketiga ; Menetapkan Bidang Penyusunan Program dan Evaluasi Kanwil Deppen Propinsi Sulawesi Selatan

sebagai pelaksana/penyelenggara forum konsultasi dimaksud, yang secara struktural mempunyai tugas untuk menyusun rencana dan program secara menyeluruh serta melakukan evaluasi terhadap hasil-hasil yang dicapai oleh pelaksana penerangan.

Adapun Program operasional penerangan (Kanwil Deppen Sulsel 1990/1991) diarahkan untuk pencapaian sasaran dan tujuan penerangan yakni terciptanya sikap dan perilaku masyarakat selaku insan pembangunan yang mendukung dan melaksanakan kegiatan pembangunan di segala bidang sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah daerah setempat.

Secara rinci program operasional penerangan tersebut memuat penggunaan sumber dana dan sumber daya serta penetapan waktu/penjadwalan pelaksanaan kegiatan penerangan.

Berdasarkan surat Keputusan Menteri Penerangan yang mencakup :

- a. Penerangan Pembangunan, yang meliputi :
 1. Program operasional penerangan yang sudah dijadwalkan misalnya berkaitan dengan hari bersejarah yang diperingati secara rutin setiap tahunnya.
 2. Program operasional penerangan yang direncanakan meliputi kegiatan berdasarkan paket operasional penerangan.

3. Program operasi penerangan khusus yang disesuaikan dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan dari pimpinan maupun pemerintah daerah, antara lain :

- Pembinaan kerja sama dengan unsur-unsur penerangan pemerintah maupun unsur penerangan masyarakat dalam bentuk penerangan terpadu.
 - Meningkatkan koordinasi dan pembinaan terhadap forum kehumasan baik yang tergabung dalam wadah BAKOHUMAS Tingkat I maupun Tingkat II.
 - Memberikan layanan informasi kepada mitra kerja penerangan seperti PWI, PRSSNI, GPBSI, BAPFIDA, SPS, SGP, PPPI, dan PIP (Pusat Informasi Pesantren)
 - Mengadakan pembinaan KELOMPOK PENCAPIR, Seksi Penerangan LKMD dan Lembaga Penerangan Masyarakat lainnya.
 - Pemantapan penjabaran Pola Pengwilayahan Komuditi dan perubahan pola pikir.
- Peningkatan penyampaian materi penerimaan pajak.

b. Pembangunan Penerangan, yang meliputi :

1. Perangkat Lunak

Yang dimaksud perangkat lunak adalah sumber daya manusia atas aparatur penerangan.

Dalam rangka pengembangan dan pendayagunaan aparatur yang berhasilguna, diprogramkan pembinaan pegawai melalui:

- Pembuatan Job Description pada masing-masing unit kerja baik Bagian/Bidang, Subbagian/Seksi Kanwil Deppen maupun Kantor Deppen Kabupaten/Kotamadya.
- Pembinaan dan pengembangan sumber daya aparat penerangan berorientasi pada bakat dan kemampuan yang dimiliki diintegrasikan dengan pengembangan dan peningkatan tugas-tugas penerangan.
- Menumbuhkan motivasi untuk melaksanakan tugas dan kewajiban melalui pendekatan yang dapat menciptakan kreativitas kerja dengan memberikan dorongan, bimbingan dan ketauladanan atas pelaksanaan tugas.
- Memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengikuti pendidikan dalam rangka peningkatan pengetahuan dan keterampilan pegawai melalui kesempatan mengikuti diklat teknis, pendidikan jenjang karir maupun pendidikan formal yang dilaksanakan di luar jam kerja.
- Mengadakan diklat / pelatihan teknis lokal bekerjasama dengan PPD Ujung Pandang maupun Instansi terkait
- Meningkatkan pelaksanaan Panca Tertib sebagaimana tertuang dalam Surat Kepala Kanwil Deppen Propinsi Sulawesi Selatan Nomor :

1120/TU/I/a/1988, tentang Program Panca Tertib,
yaitu :

(1) Tertib Administrasi

(2) Tertib Organisasi

(3) Tertib Operasional

(4) Tertib Mekanisme dan Koordinasi antar Unit
Kerja

(5) Tertib Keakraban secara fungsional dan
Struktural diantara pegawai

- Peningkatan pengawasan melekat secara terus
menerus dan berjenjang sebagai upaya
pendayagunaan aparatur penerangan.

2. Perangkat Keras

Berdasarkan sumber dana yang tersedia pada tahun
anggaran 1990/1991, program pembangunan penerangan
yang menyangkut perangkat keras, direncanakan :

a. Penerbitan

Penerbitan penerangan diprogramkan untuk menunjang
proses pemerataan informasi melalui media
penerbitan baik yang diterbitkan oleh Kanwil
Departemen Penerangan maupun Kantor Deppen
Kabupaten/Kotmadya seperti : *Citra Dian, Bulletin
Penerangan, Info Khusus, Serambi Depan Informasi,
Bimbingan Penerangan, Poster, Gambar Dinding,
Leaflet selebaran dan penerbitan lainnya.*

b. Program Koran Masuk Desa

Program Koran Masuk Desa di Daerah Sulawesi Selatan dilaksanakan dengan Surat Kabar *Pedoman Rakyat*, berdasarkan kontrak kerja dengan oplag setiap kali terbit :

Pedoman Rakyat 3200 Eks. realisasi 6500 Eks.

Mimbar Karya 3200 Eks. realiasi 20000 Eks.

Pos Makassar 3200 Eks. realiasi 4000 Eks

Program Koran Masuk Desa (KMD) di daerah Sulawesi Selatan dimaksudkan untuk lebih memantapkan interaksi positif antara pemerintah, pers dan masyarakat di daerah pedesaan agar lebih mendukung dan mensukseskan pembangunan dan berbagai kebijaksanaan pemerintah daerah.

c. Program Surat Kabar Untuk Desa (SKUD)

Program Surat Kabar Untuk Desa tahun Anggaran 1990/1991 dengan penyebarluasan harian *Suara Karya*, sebagaimana jatah yang ditetapkan sementara

(kontrak belum diterima) sebanyak : 190.128 Expl.

atau setiap bulan = 15.844 expl. untuk 23 Kandeppen

Kab./Kotamadya dan Kanwil Deppen Sulawesi Selatan.

Program Penyebarluasan Surat Kabar Untuk Desa (SKUD) ini dimaksudkan untuk mendukung kebijaksanaan pemerataan arus informasi; penerangan pem-

bangunan sampai ke daerah-daerah pedesaan.

Pelaksanaan kegiatan operasional penerangan yang dilaksanakan oleh jajaran Kantor Wilayah

Departemen Penerangan Propinsi Sulawesi Selatan maupun Kantor Deppen Kabupaten/Kotamadya dalam rangka peningkatan bobot operasional penerangan diperlukan adanya dukungan sarana dan prasarana untuk menunjang mobilitas kegiatan penerangan menjangkau dan memperluas daerah sasaran.

Pendayagunaan sarana operasional penerangan untuk mendukung optimalisasi kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya menjangkau dan memperluas sasaran penerangan.

Mengingat kondisi sarana dan prasarana yang ada, sebagian besar merupakan pengadaan lama dan mengalami kerusakan, maka agar tetap berdayaguna dan mampu mendukung kegiatan yang semakin hari semakin meningkat, pemanfaatannya diprogramkan :

- Pemeliharaan melalui penggantian dan atau perbaikan komponen yang rusak
- Pemanfaatan berdasar prioritas kegiatan
- Pengadaan/pembelian terhadap sarana yang dapat dibiayai dengan dana yang tersedia.

3. Lain - Lain

Kegiatan operasional penerangan berorientasi pada

upaya menyukseskan berbagai kebijaksanaan pembangunan baik yang berskala nasional maupun regional di daerah Sulawesi Selatan yang akhir-akhir ini berkembang menjadi pusat pengembangan wilayah Indonesia Bagian Timur, Untuk membentuk dinamika pelaksana-pelaksana pembangunan secara nyata, termasuk jajaran penerangannya.

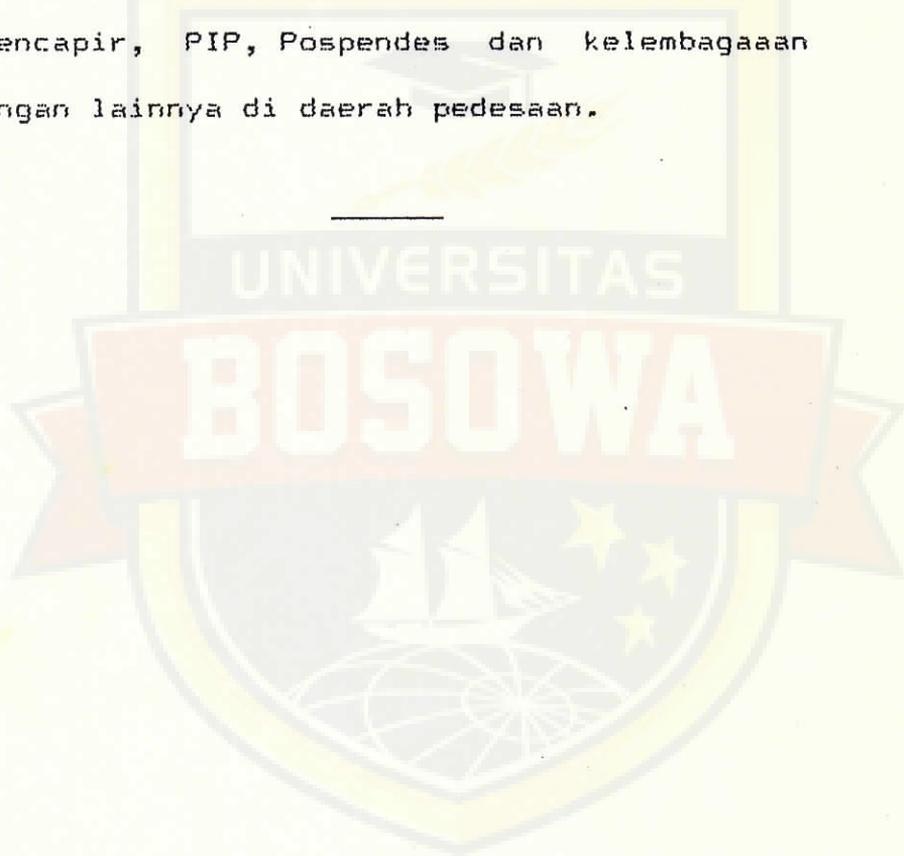
Selain daripada itu, kebijaksanaan strategis pengwilayahan komoditas, perobahan pola pikir dan peningkatan kualitas sumber daya pembangunan memerlukan dukungan dan persiapan aparat penerangan di daerah.

Untuk itu, dalam tahun anggaran 1990/1991 diprogramkan orientasi operasional penerangan lebih mengintegrasikan dengan pola dasar kebijaksanaan pemerintah daerah yaitu :

- Mensukseskan progam pengwilayahan komoditas pertanian dalam rangka menciptakan tata ruang dan penataan sumber-sumber daya.
- Melanjutkan Pelaksanaan perobahan pola pikir masyarakat di daerah Sulawesi Selatan yang berpikiran maju, kreatif, inovatif dan kreativitas.
- Mengembangkan dan peningkatan operasional penerangan terpadu dengan instansi sektoral

seperti : Kampanye sadar Wisata, Pajak, KB/BKKBN, Kesehatan, Perbankan/BRI, Koperasi dan lain sebagainya.

- Untuk penyiapan pelaksanaan pekan penerangan pedesaan tingkat Nasional Tahun 1991, disiapkan pranata-pranata seperti : Peningkatan peranan Kelompencapir, PIP, Pospendes dan kelembagaan Penerangan lainnya di daerah pedesaan.



BAB IV

SISTEM PERENCANAAN PENERANGAN TERPADU PADA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENERANGAN RI PROPENSI SULAWESI SELATAN

A. Sistem Perencanaan

Sebagaimana telah dipaparkan pada bab terdahulu bahwa yang dimaksud perencanaan adalah penentuan langkah-langkah suatu kegiatan yang akan dikerjakan dimasa yang akan datang dengan memperhatikan faktor-faktor apa (*what*), mengapa (*why*), dimana (*where*), kapan (*when*), siapa (*who*), bagaimana (*how*). Sesuai teori para pakar administrasi dan manajemen bahwa apa saja yang akan dikerjakan mutlak diperlukan perencanaan yang matang, karena perencanaan ini juga merupakan standar dalam evaluasi.

"Apa" berarti penentuan kegiatan apa yang hendak dilaksanakan. Jadi hendaknya kegiatan pertama dari perencanaan itu adalah menetapkan dengan jelas tentang apa yang hendak dilaksanakan.

Tahap kedua adalah menjelaskan "mengapa" kegiatan tersebut dilaksanakan, apa pentingnya. Tahap ini kita akan merumuskan apa akibat seandainya kegiatan tersebut tidak dilaksanakan dan sebaliknya apa manfaat jika seandainya

kegiatan tersebut dilaksanakan. tahap ini sering juga disebut sebagai tahap penentuan tujuan.

Tahap ketiga yaitu menentukan "siapa" yang akan melaksanakan kegiatan tersebut. Faktor ini cukup menentukan berhasil tidaknya suatu rencana. Dalam fungsi manajemen biasa disebut dengan pengorganisasian. Pada tahap ini ditentukan tingkat pengetahuan dan pengalaman, senioritas dari para pelaksana suatu rencana.

Tahap selanjutnya menentukan "bagaimana" kegiatan tersebut dilaksanakan. Pada tahap ini ditentukan metode-metode, prosedur-prosedur, aturan-aturan, termasuk penentuan jumlah biaya (*budgetting*) dan sumber biaya. Tahap ini juga akan ditentukan alat-alat (sarana dan prasarana) yang akan digunakan.

Agar kegiatan yang hendak kita laksanakan itu, berjalan secara sistematis, kontinuitas dan terkordinasi maka perlu ditentukan "kapan" setiap kegiatan tersebut dilaksanakan (perlu ada penjadwalan kegiatan), sebab tanpa penentuan jadwal kegiatan, maka tujuan yang telah ditetapkan semula tidak dapat tercapai dan kemungkinan akan terjadi kerugian dan pemborosan.

Dan yang terakhir adalah penentuan sasaran, siapa yang menjadi sasaran kegiatan tersebut. Langkah ini akan dianalisa faktor geografis maupun faktor demografis. Geografis berarti analisa tentang keadaan alam, sedangkan

demografis berarti analisa tentang keadaan penduduk (masyarakat) antara lain yang perlu dipertimbangkan adalah pendidikan, tingkat umur, faktor sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya.

Tahap yang terpenting sebelum menjawab 5 W + 1 H adalah mengetahui keadaan yang akan menjadi ruang lingkup perencanaan (sasaran). Dalam tahap ini diadakan pengumpulan data dan fakta termasuk pengetahuan potensi dan masalah yang terdapat pada sasaran perencanaan.

Jadi proses perencanaan ini dapat dilihat sebagai suatu sistem, tahap penentuan rencana (menjawab 5W + 1H), tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi serta memonitoring rencana.

Adapun pelaksanaan dan cara-cara yang digunakan, baiklah kita memperhatikan hasil pengumpulan data yang telah dilakukan oleh penulis.

1. Tahap persiapan

a. Analisa keadaan dan masalah

Sebagaimana kita ketahui bahwa sasaran penerangan adalah manusia dan atau masyarakat. Kanwil Deppen Propinsi Sulawesi Selatan sasaran penerangannya adalah masyarakat yang berdomisili di Sulawesi Selatan sebanyak 6.731.236 jiwa (Data 1989, sumber Kantor Statistik Propinsi Sulawesi Selatan)

yang tersebar ke dalam 21 kabupaten, 2 kotamadya, 178 kecamatan, 1.237 desa/kelurahan, dan 1.26 LKMD (Kerja Kanwil Deppen 1990/1991 : 17).

Dalam bab II Program kerja Kanwil Deppen Propinsi Sulawesi Selatan dipaparkan secara garis besar tentang keadaan dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat Sulawesi Selatan (Program Kerja Kanwil Deppen Propinsi Sulawesi Selatan 1990/1991: 16-50). Secara singkat penulis dapat memaparkan bagaimana keadaan dan masalah di Sulawesi Selatan yang merupakan hasil pengumpulan data dan fakta yang dilakukan oleh pihak Kanwil Deppen Sulawesi Selatan (Bidang Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi) sebagai berikut :

(1) Analisa Keadaan.

(a) Kondisi dan Potensi Wilayah

- Mata Pencabarian Penduduk menurut lapangan kerja; yaitu pertanian, pemerintahan, perdagangan, pariwisata.
- Keadaan Daerah; yaitu letak geografis Sulawesi Selatan, dan kekayaan alam.
- Perbandingan pemeluk agama dan kegiatannya
- Pendidikan
- Keadaan alam dan cuaca
- Tempat rekreasi dan hiburan

(b) Situasi, ideologi, Polkam dan Kesra (masalah Ekuin)

(2) Masalah yang dihadapi

(a) Umum

- Jumlah pertumbuhan penduduk dan perbandingan kelompok usia.
- Perbandingan tenaga kerja dan lapangan kerja.
- Perbandingan jumlah penduduk dengan pengadaan bahan makanan.
- Perbandingan laju pembangunan perwilayah, strategis pembangunan di Sulsel.
- Kesehatan

(b) Masalah Intern

- (1) Perangkat lunak dan perangkat keras
- (2) Pelaksanaan Operasional Penerangan di daerah Sulawesi Selatan

(c) Pembinaan Kelompencapir

- (1) Faktor dana
- (2) Pelaksana Koordinasi pembinaan terhadap organisasi Kelompencapir

(d) Pekan Penerangan Pedesaan

Dalam penerapan keadaan dan masalah tersebut, digambarkan bagaimana masalah-masalah di Sulawesi

Selatan serta keadaan dan masalah pada Kanwil Deppen Propinsi Sulawesi Selatan itu sendiri. Digambarkan pula bagaimana masalah yang dihadapi Deppen Sulawesi Selatan dalam menghadapi keadaan di Sulawesi Selatan.

Dalam pengumpulan data di atas, selain Deppen itu sendiri juga telah dilibatkan beberapa instansi, antara lain Badan Koordinasi Penanaman Modal Propinsi Sulawesi Selatan, Kanwil Parpostal Propinsi Sulawesi Selatan, Kanwil Dep. Agama Propinsi Sulawesi Selatan, Kanwil Depdikbud Propinsi Sulawesi Selatan, Kanwil Dep. Perdagangan Propinsi Sulawesi Selatan, Kantor Statistik Propinsi Sulawesi Selatan. Dengan terlibatnya beberapa instansi departemen/ lembaga non departemen seperti dipaparkan di atas, hal ini menunjukkan bahwa dalam tahap persiapan sudah diperlukan koordinasi yang pada akhirnya melahirkan keterpaduan dalam perencanaan.

b. Bahan Masukan Program

Setelah diketahui keadaan dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat Sulawesi selatan maka perlu pula menjadi pertimbangan daripada masukan-masukan yang diperoleh baik dari atas, dari samping, maupun dari bawah, terutama apabila perencanaan itu menyangkut operasional penerangan di daerah. Proses

ini dapat dilakukan dengan mengorganisir semacam forum perencanaan terpadu di tingkat daerah atau ditingkat wilayah.

Input atau masukan dari bawah diharapkan dapat diperoleh melalui juru penerang kecamatan dan LKMD, kandeppen daerah tingkat II, anggota-anggota kelompencapir. Juru penerang diharapkan banyak memberikan masukan karena merekalah yang akan berhadapan langsung dengan audience (masyarakat).

Sedangkan input dari samping dapat diperoleh melalui instansi setingkat (wilayah Sulawesi Selatan) baik departemen, lembaga negara non departemen, maupun humas-humas yang ada di masyarakat (sering disebut "kerabat kerja" Deppen) lembaga ini dihimpun dalam BAKOHUMAS (badan koordinasi hubungan masyarakat). Bakohumas ini suatu lembaga yang dikoordinasi Deppen Wilayah Sulawesi Selatan dimana para wakil instansi ada didalamnya. Dengan adanya Bakohumas ini diharapkan kordinasi, sinkronisasi dan integrasi dalam rangka perencanaan operasional penerangan berjalan dengan baik.

Input yang berasal dari atas adalah kebijaksanaan-kebijaksanaan dari pemerintah pusat, baik dari Menteri Penerangan RI, Dirjen Penerangan maupun lembaga-lembaga vertikal lainnya. masukan dari atas

tentu berskala nasional dan untuk kepentingan nasional, misalnya; kebijaksanaan debirokratisasi dan deregulasi, kebijaksanaan keluarga berencana, koperasi, pertanian, pemasyarakatan P-4 dan sebagainya.

Disamping itu masukan atau informasi dari pelaksanaan intern, dalam hal ini bidang-bidang dan bagian yang ada di Departemen Penerangan Propinsi Sulawesi selatan juga diperlukan.

Untuk mengkoordinasikan masukan-masukan dalam rangka perencanaan terpadu ini, memerlukan waktu dan dana serta tenaga yang terampil.

c. Penyusunan Rencana

Di bidang pembangunan penerangan, menyangkut dimensi ruang dan waktu serta prasarana yang mendukung, maka perlu diadakan pengendalian yang sebaik-baiknya melalui suatu keterpaduan. Pengendalian yang dimulai dari perencanaan harus diperhatikan jadwal waktu.

Dalam bab II Sub C hasil-hasil keputusan Rapat Kerja Paripurna Deppen tahun 1984 disebutkan bahwa:

Jadwal waktu pengendalian dari perencanaan masing-masing :

- a. Bulan Mei selesai tingkat Kandeppen.
- b. Bulan Juli selesai tingkat Kanwil.
- c. Bulan Agustus-September selesai tingkat Ditjen (Deppen RI, 1984: 21)

Berdasarkan jadwal tersebut di atas maka jajaran Departemen Penerangan menjadikan sebagai pedoman standar, dimana daftar usulan proyek (DBQ) Departemen Penerangan dibicarakan dengan Bappenas sekitar 15 Desember.

Kebijaksanaan jadwal pelaksanaan perencanaan terpadu oleh Kanwil Departemen Penerangan Propinsi Sulawesi Selatan diatur dalam Instruksi No.38/Inst/ss/K/1989 tentang pelaksanaan keterpaduan bidang penerangan untuk tahun anggaran 1989/1990. Dalam instruksi ini secara sistematis dan kontinue diatur urutan waktu perencanaan mulai dari tahap penyusunan/pengolahan program kerja tahunan, triwulan dan bulanan sampai ke meja forum konsultasi Kanwil Departemen Penerangan Propinsi Sulawesi selatan. Forum konsultasi ini mempunyai tugas untuk menyusun rencana dan program secara menyeluruh serta melakukan evaluasi terhadap hasil-hasil yang dicapai oleh pelaksanaan penerangan.

Dalam Instruksi No.38/Inst/ss/K//1989 tersebut ditetapkan bahwa setiap kepala bidang /bagian di lingkungan Kanwil Departemen Penerangan Propinsi Sulawesi selatan mulai 1 April 1989 seharusnya telah

menyiapkan secara rutin setiap tahap penyusunan/pengolahan Program Kerja Tahunan, Triwulan, Bulanan, bahan-bahan masukan menurut tugas dan fungsi masing-masing unit/satuan kerja. Selanjutnya diatur pula bahwa untuk Program kerja tahunan 1989/1990, input data diterima paling lambat tanggal 15 April 1989, untuk Program kerja Triwulan I, II, III, dan IV selambat-lambatnya diterima tanggal 5 Triwulan yang bersangkutan, dan program kerja bulanan selambat-lambatnya tanggal 8 setiap bulan.

Untuk terwujudnya kesatuan gerak yang serasi, maka bahan-bahan masukan tersebut dibahas lagi secara hirarkhi antar bagian dan sub bagian, dan antara bidang dengan seksi-seksi, yang pada akhirnya dibahas dalam Forum konsultasi Kanwil Departemen Penerangan Propinsi Sulawesi Selatan, Forum konsultasi ini diserahkan sepenuhnya kepada bidang penyusunan program dan Evaluasi Kanwil Departemen Penerangan Propinsi Sulawesi Selatan.

Skema Proses Perencanaan Operasional Penerangan Kantor Wilayah Departemen Penerangan Propinsi Sulawesi Selatan.

2. Tahap Penentuan Rencana

Setelah masukan-masukan tersebut diolah (oleh Forum Konsultasi Kanwil Deppen Propinsi Sulawesi Selatan) sedemikian rupa, maka terwujudlah suatu rumusan perencanaan untuk dilaksanakan pada masa akan datang, Sebagaimana hasil rumusan Program Kerja Kanwil Deppen Propinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 1990/1991 Pelita V tahun kedua. Dalam program kerja ini ditentukan target Operasional, pembiayaan, aparat penyelenggara, penjadwalan kegiatan dan sasaran program operasional Penerangan.

a. Target Operasional

Target operasional penerangan yang di tetapkan bertujuan untuk memacu pelaksanaan kegiatan dan sekaligus merupakan tolak ukur yang disesuaikan dengan penyediaan sumber dana rutin (DIK) maupun sumber dana pembangunan (DIP) yang tersedia pada setiap tahun anggaran sebagai pendukung operasional Penerangan.

Target operasional Penerangan dimaksud adalah hasil yang harus dicapai dari kegiatan operasional penerangan dari pemanfaatan media dan sarana penerangan.

b. Pembiayaan Kegiatan

Pada hakekatnya kegiatan operasional penerangan yang dilaksanakan oleh Kanwil Deppen Propinsi Sulawesi Selatan, bersumber dari dana rutin (DIK Tahun anggaran 1990/1991) yang terinci dalam setiap tolak ukur kegiatan atau petunjuk operasional (PO):

(1) Dalam DIK Tahun anggaran 1990-1991 melalui mata anggaran 250 teralokasi dana sebesar Rp. 100.000,- untuk membiayai/mendukung kegiatan-kegiatan.

Tabel 2

Rincian Penggunaan Dana Rutin
Mata Anggaran Tahun Anggaran 1990 - 1991

No	Jenis kegiatan	Frekuensi Kegiatan Dlm 1 Tahun	DUKLINGAN BIAYA		Ket.
			Satuan biaya per kegiatan	Total biaya (3 X 4)	
1	2	3	4	5	6
1	Pemanfaatan Penerangan Tatap Muka, terdiri : ceramah, anjangan, penerangan keliling, pelayanan Informasi Pelayanan Jupon dan sarasehan.	1.920	Rp. 5.000	Rp.9.600.000	16 X 12 X 10 Orang
2	Pemantapan media pemutaran film penerangan dan dan rekaman Video.	96	Rp.15.000,-	Rp.1.440.000	8 X/bln

1	2	3	4	5	6
3.	Pemanfaatan media siaran radio (RRI - RSNP)	48	Rp. 3.000,-	Rp. 144.000	4X/bln
4.	Pemanfaatan media pertunjukan Rakyat (Pertura)	24	Rp.100.000,-	Rp.2.400.000,	2 X/bln
5.	Pemanfaatan Media Pameran	12	Rp.125.000,-	Rp.1.500.000,	1X/bln
6.	Pemanfaatan media cetak dengan rincian kegiatan:	48	Rp. 30.500,-	Rp.1.464.000,	
	a. Poster/spanduk				1 X/bln
	b. Selebaran				1 X/bln
	c. Brosur				1 X/bln
	d. Bahan Per				
	e. Penerbitan				
	Ini sesuai				
	Kebutuhan				
	f. Citra Dian/				4 X/bln
	Triwulan				
7.	Pemanfaatan forum Humas terdiri atas kegiatan:	8	Rp. 52.000,-	Rp. 416.000,	2 X/bln
	a. Jumpa Pers/				
	Ket.Pers				
	b. Rakor ketumasan				
8.	Penataran JLPEN (Pembinaan)	1	Rp.100.000,-	Rp. 100.000,	1 X/Thn
9.	Pelayanan Foto Dokumentasi	24	Rp. 20.000	Rp. 480.000,-	2 X/bln
10.	Pelayanan Pakai-an kerja Sopir/ Tenaga Teknis/ Satpam	22 orang	Rp. 25.000,-	Rp. 556.000,-	1 peg/ bln

Total Pembiayaan : Rp.18.100.000,- (Delapan belas juta seratus ribu rupiah),

Sumber : DAFTAR ISIAN KEGIATAN (DIK) Tahun 1990/1991
Kariwil Deppen Sulawesi Selatan.

(2) Sumber dana pembangunan yang tergantung dalam proyek operasional penerangan di Sulawesi Selatan (DIP 1990-1991) sebesar Rp.386.079.000,- yang terinci menurut tolak ukur setiap kegiatan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3

**Tolak Ukur Kegiatan
Proyek Operasi Penerangan di Sulawesi Selatan
Tahun Anggaran 1990 / 1991**

No	Tolak Ukur & Uraian Kegiatan	Jumlah Dana
1	2	3
1	01.01.1 Administrasi Proyek 30 OB X 12	Rp. 10.980.000,-
2	01.01.3 ATK, Pengadaan dan Pengiriman	Rp. 1.800.000,-
3	01.01.5 Perjalanan ke Pusat dan ke Kabupaten/Kota madya.	Rp. 4.113.000,-
4	01.01.7 Evaluasi Situasional Jupen & biaya pengiriman	Rp. 6.111.000,-
5	01.02.3 Pengadaan bahan dan operasional Penerangan 46.000 expl, dan 6.900 buku, terdiri dari : a. Paket Ekuin, Polkam, Kesra (4x1 thn x100 expl.a' Rp. 750,- b. Poster/Leafet/Book let (4x1 thn x 1000 expl.a' Rp. 750,- c. Buku Jurnal Penerang- an (50 expl x 12 Bln .a Rp 750 d. Penerbitan Bahan Pe- nerangan pada 23 Kan- deppen Kab/Ko (500 buku x 4 x 1 Tahun) a' Rp. 750,-	Rp. 45.400.000,-

1	2	3
	e. Buku Jurnal Laggas pada 23 Kab/Ko (25 expl x 12 bln x 23. a' Rp. 500,-	
6	01.02.5 Operasi Jupen: (3 x 12 bln x 679 Jupen)	Rp. 61.110.000,-
7	01.03.6 Penyelenggaraan 12 Paket kegiatan terdiri dari: 1) Kegiatan Pameran 2) Penerangan Tata Muka 3) Kehumasan 4) Pemutaran Film Penerangan 5) Pameran Keliling 6) Pembinaan Kelompokcapir 7) Peragaan Foto Harkitnas 8) Kegiatan Pertunjukan Rakyat 9) Kegiatan ABRI Masuk Desa 10) Pariwisata 11) Pajak 12) Pembinaan Sumber daya Manusia	
8	01.04.6 Surat Kabar Untuk Desa (SKUD) 190.128 expl.	Rp. 65.594.000,-
9	01.05.6 Pengadaan 11 Copy Film Penerangan	Rp. 24.200.000,-
10	01.06.6 Suku Cadang AVA 152 buah, 22 set	Rp. 9.638.000,-
11	01.07.7 Pengadaan MU 1 buah Peralatan & mesin 6 unit	Rp. 26.013.000,-
12	01.08.8 Pengadaan Computer 1 Unit	Rp. 5.000.000,-
	Total Dana DIP 1990/1991	Rp.386.079.000,-

Sumber: Daftar Isian Proyek Tahun Anggaran 1990/1991 No.

DIP: 038/XIV/3/--/1990 tgl. 1 - 3 - 1990.

c. Aparat Penyelenggara

Penyelenggaraan kegiatan operasional penerangan, pada hakekatnya dilaksanakan oleh seluruh aparat pemerintah sebagai penyelenggara tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dalam Kabinet Pembangunan V. Namun secara fungsional, maka kegiatan operasional penerangan dipertanggungjawabkan oleh Departemen Penerangan.

Ada dua klasifikasi dalam pelaksanaan kegiatan penerangan, yakni:

(1) Aparat Departemen Penerangan

Untuk kegiatan penerangan yang seluruh penyelenggaraan dan pembicaranya terdiri dari aparat Departemen Penerangan dengan kriteria:

- (a) Aparat Deppen dan unsur tokoh masyarakat, lembaga swadaya, organisasi fungsional, organisasi profesional, unsur kelembagaan masyarakat, maupun kalangan swasta.
- (b) Aparat Departemen Penerangan dan instansi/ lembaga pemerintah non departemen, dinas serta tokoh masyarakat, lembaga swadaya, organisasi fungsional, organisasi profesi, unsur kelembagaan masyarakat serta swasta.

(2) Pelaksana Non Departemen Penerangan

Bentuknya berupa kegiatan penerangan yang diselenggarakan oleh bukan aparat Departemen Penerangan. Peranan aparat Departemen Penerangan hanya turut menghadiri serta melaporkan kegiatan yang dihadapinya (peliputan), dengan kriteria pelaksanaan dan pembicaranya terdiri dari:

- (a) Aparat Departemen/Dinas/Instansi/Lembaga Pemerintah/LPND (lembaga pemerintah non departemen).
- (b) Unsur Tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya, Organisasi Fungsional, Organisasi Progesi, kelembagaan masyarakat dan kalangan Swasta.
- (c) Aparat Departemen/Dinas/Instansi/Lembaga Pemerintah/LPND dan unsur Tokoh Masyarakat dan kalangan Swasta.

(3) Secara struktural menurut Surat Keputusan Menteri Penerangan RI Nomor 55 B/Menpen/SK/1975, maka kegiatan operasional penerangan dilaksanakan oleh Bidang-bidang beserta seksi-seksinya dan Bagian Umum beserta Sub bagiannya sebagai pendukung operasional penerangan.

d. Penjadwalan Kegiatan

Untuk penjadwalan kerja dari setiap kegiatan yang terprogram dalam Tahun Anggaran 1990//1991, dapat dilihat pada Tabel 4. Dalam tabel ini dapat dilihat selain jenis kegiatan, jadwal kegiatan per bulan juga dapat dilihat sumber biaya, sasaran kegiatan dan para aparat pelaksananya.

e. Sasaran Program Operasional Penerangan

Penerangan pembangunan diabadikan untuk turut mensukseskan pembangunan nasional. Orientasi program operasional penerangan Kantor Wilayah Departemen Penerangan Propinsi Sulawesi Selatan yang didukung oleh Kantor Deppen Kabupaten/Kotamadya, RRI Nusantara IV, TVRI Ujung Pandang diupayakan untuk mendukung serta mensukseskan pembangunan yang dialokasikan di daerah Sulawesi Selatan baik yang berskala nasional maupun regional.

Sejalan dengan prioritas pembangunan Repelita kelima dimana sasaran operasional penerangan diprioritaskan untuk mendukung pembangunan ekonomi yang diletakkan pada sektor pertanian.

Untuk daerah Sulawesi Selatan program tersebut dijabarkan dalam konsep pengwilayahan komoditas sebagai strategi pembangunan daerah.

Selain daripada itu konsepsi pembangunan Repelita V, sasarannya untuk menciptakan kerangka landasan dalam rangka bangsa Indonesia tinggal landas dalam menuju kondisi masyarakat sejahtera. Untuk itu sasaran penerangan merupakan pedoman dalam mentransformasi upaya meletakkan kerangka tinggal landas yang akan dicapai dalam kurung waktu 5 tahun dan dilaksanakan secara bertahap dari tahun pertama sampai dengan kelima dalam Repelita V.

Sasaran program penerangan tahun anggaran 1990/1991 (Tahun II Repelita V) berpayung pada Instruksi Menteri Penerangan RI Nomor: 3/Inst/Menpen/1989 tentang peningkatan kualitas operasional penerangan, yang antara lain:

- (1) Peningkatan kualitas operasional Penerangan.
- (2) Peningkatan usaha penerangan mendukung keberhasilan program pembangunan.
- (3) Peningkatan kualitas aparat penerangan.
- (4) Peningkatan kualitas dan kemampuan profesionalisme melalui diklat.
- (5) Pendayagunaan sarana dan Prasarana penerangan secara optimal.
- (6) Peningkatan pembinaan dan pengembangan forum komunikasi dan kelompok informal melalui usaha swadaya swakarsa masyarakat.

- (7) Efektifitas kelembagaan, organisasi dan ketatalaksanaan serta pengawasan.
- (8) Pemanfaatan peranan media cetak, elektronika dan media tradisional untuk meningkatkan motivasi produktivitas masyarakat.
- (9) Pembinaan fungsi peralihan dan pengembangan penerangan untuk mendukung perencanaan, kebijaksanaan dan strategi penerangan.

B. Masalah-Masalah yang Berhubungan dengan Perencanaan Terpadu

1. Kurangnya Koordinasi dalam Penyusunan Rencana

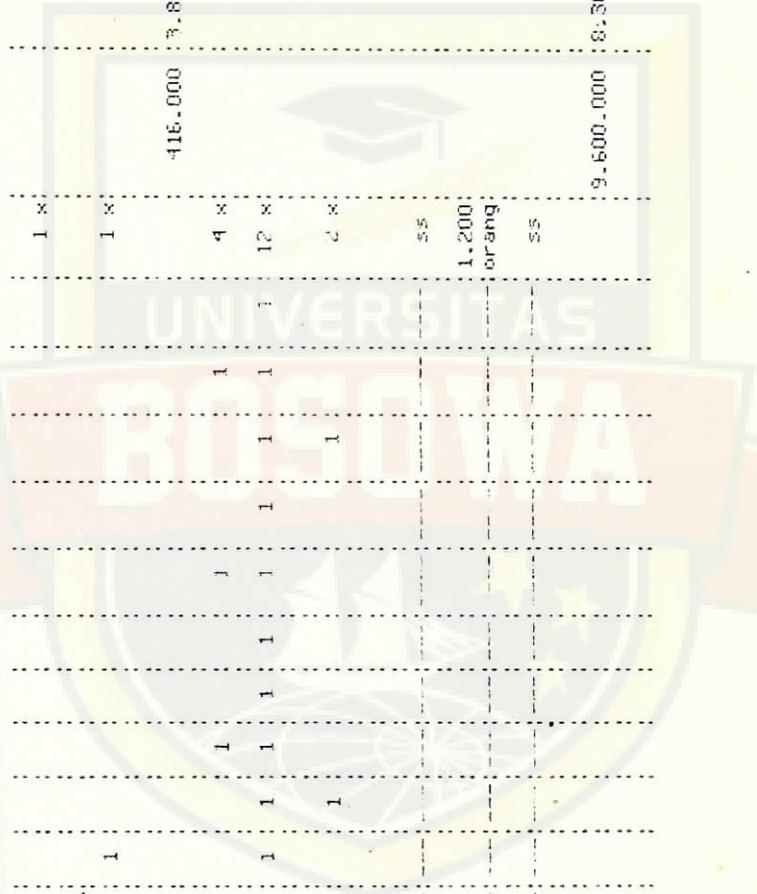
Telah dijelaskan bahwa Departemen Penerangan dengan segala jajaran kerjanya tidak menjalankan penerangan sendiri, tetapi menjalankan penerangan pemerintah. Dengan demikian segala rencana pemerintah, kebijaksanaan dan atau keputusan pemerintah secara keseluruhan adalah merupakan program kerja penerangan. Karena itu Departemen Penerangan yang digolongkan sebagai juru bicara pemerintah, semua program yang ada pada instansi pemerintah adalah menjadi tanggung jawab Departemen Penerangan dengan segala jajaran kerjanya di dalam upaya penterapan tentang latar belakang dan perlunya dilaksanakan untuk kepentingan bangsa dan negara.

Andaikata semua instansi pemerintah telah menyadari fungsi ini dan konsisten untuk menyerahkan tugas-tugas

(C1)	(C2)	(C3)	(C4)	(C5)	(C6)	(C7)	(C8)	(C9)	(C10)	(C11)	(C12)	(C13)	(C14)	(C15)	(C16)	(C17)	(C18)	(C19)
2.3.	Pemeran bantuan kepada Instansi/organisasi Masyarakat			1			1			1				4 x				
2.4.	Evaluasi Pelaksanaan Pemeran ke Kandeppen Kab/Ko									x				23 x				
2.5.	Laporan Kegiatan Pemeran	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14 x				
2.6.	Pemeran Keliling	1		1			1				1			4 x		2.300.000		
3.	KELOMPENCAPIR														147.000	5.800.000		
3.1.	Pemanfaatan media siaran radio (RRI, RSMF)	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	192 x				
3.2.	Rapat Koordinasi TPSP	1		1			1				1			4 x				
3.3.	Rasah Terampil	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12 x				
3.4.	Sarasehan													1 x				
3.5.	Pendapatan Kelompokcapir													85				

Kelompok capir / Khalayak umum / Instansi terpa - du RSNP, TPSP - Bidang Koordi - nasi Media pe - nerangan (sek - si siaran ra - dio

(C1)	(C2)	(C3)	(C4)	(C5)	(C6)	(C7)	(C8)	(C9)	(C10)	(C11)	(C12)	(C13)	(C14)	(C15)	(C16)	(C17)	(C18)	(C19)
3.6.	Kompetisi Kelompencapir	1												1 x				
3.7.	Pengiriman ke tingkat Nasional		1											1 x				
4.	KEHUMASAN														416.000	3.800.000		
4.1.	Jumpa Pers	1				1								4 x				
4.2.	Rapat Koordinasi Bako-humas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12 x				
4.3.	Pemataran Bako-humas													2 x				
4.4.	Pembuatan Press Release													ss				
4.5.	Riportase													1.200 orang				
4.6.	Pelayanan Informasi Melalui SMI													ss				
4.7.	Pendataan Kegiatan																	
5.	PENERANGAN TATAH HUKH														9.600.000	8.300.000		



PR, TVRI, Media Massa, Anggota Bako-humas, Pengurus Bako-humas Tk I, Tk II
 Penj. Deppen RI masyarakat pencari informasi
 Ket.
 - Setiap bulannya 100 orang

Bidang hubungan dan penerangan masyarakat (seksi humas)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
5.1.	Ceramah Instansi/Daerah- Tk. I dan Tk. II	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12 x	-	-	-	Bidang hubungan- dan Penerangan- Masyarakat
5.2.	Diskusi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4 x	-	-	-	(seksi ceramah- dan diskusi)
5.3.	Sarasehan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4 x	-	-	-	Instansi Tk. I, Masyarakat Umum Organisasi Pro- fesi
5.4.	Operasional Penerangan ABRI Masuk Desa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4 x	2.879.400	-	-	-
5.5.	Operasional Penerangan Tentang Parasitosa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12 x	3.300.000	-	-	-
5.6.	Operasional Penerangan Tentang Pajak	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12 x	3.300.000	-	-	-
6.	PEMBAHANGKAN SUMBER DAYA MANUSIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12 x	3.653.000	-	-	-
6.1.	Pelatihan Penusunan Program dan Pelaporan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2 x	-	-	-	Stap penjurusan; Bidang Penbi- naan Kegiatan Penerangan Daerah
6.2.	Pembinaan Penustradara- raan/penulis naskah	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12 x	-	-	-	-
6.3.	Pembinaan Kegiatan Penerangan Daerah	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12 x	-	-	-	-

penerangan kepada Departemen Penerangan, maka masukan program mungkin tidak akan menjadi masalah.

Kantor Wilayah Departemen Penerangan Propinsi Sulawesi Selatan tidak akan mungkin dapat mengembang tugas dan tanggung jawabnya secara baik tanpa adanya masukan program dari instansi lain, selanjutnya disadari bahwa untuk menerima masukan dari luar/instansi tentu saja faktor koordinasi dan sinkronisasi memegang peranan penting. Dalam hal yang demikian antara penerima dan pemberi masukan harus saling merasa satu dalam kebersamaan program.

Dalam rangka mewujudkan koordinasi, di Kanwil Departemen Penerangan propinsi Sulawesi Selatan terbentuk satu wadah yang bermuara kepada itu, yakni Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) yang berlandaskan Instruksi Menteri Penerangan No. 02 Tahun 1976.

Dari proses dan pertumbuhan Bakohumas ini ternyata belum mampu memecahkan masalah kordinasi antar instansi di Sulawesi Selatan. Masalah yang menonjol dalam operasional Bakohumas ini antara lain:

- a. Personil yang ada di dalam Badan ini sekitar 90 % hanya berupa pemenuhan formalitas dan bukan karena kemampuan profesi sebagai Humas.
- b. Beberapa pimpinan instansi pemerintah belum mengerti secara jelas apa dan bagaimana kedudukan Badan

Kehumasan ini, sehingga beberapa diantaranya mengirim personil sebagai wakil instansinya tidak sesuai permintaan.

- c. Bakohumas itu sendiri belum mampu menciptakan suatu mekanisme kerja yang konkrit dan berkesinambungan.
- d. Tidak tersedianya dana rutin dan fasilitas kerja, baik dari Pemda Tingkat I Propinsi Sulawesi Selatan maupaun dari Departemen Penerangan.

Beberapa faktor yang merupakan hambatan dalam pelaksanaan perencanaan terpadu, menurut analisa penulis yang pada dasarnya merupakan variabel hambatan pelaksanaan koordinasi penerangan terpadu, antara lain dapat dikemukakan:

- a. Masih kurangnya kesatuan pengertian (*unity of understanding*).

Untuk menciptakan mekanisme suatu perencanaan terpadu diperlukan saling pengertian dari unsur-unsur penerangan, terutama dari unsur penerangan Pemerintah (Instansi/Dinas/Lembaga Non Departemen).

Tidak adanya kesatuan pengertian ini biasanya disebabkan kurangnya kesadaran bahwa tujuan yang akan dicapai tidak dirasakan sebagai tujuan bersama. Hal ini disebabkan dipengaruhi oleh perasaan egoisme sektoral dan egoisme internasional sehingga mempengaruhi kurangnya jaringan kerja sama.

b. Masih terdapatnya perbedaan kepentingan yang biasanya bersumber dari perbedaan motivasi. Misalnya soal prestise, birokrasi yang kurang sehat, merasa instansinya lebih penting dan lain sebagainya.

Konsep Perencanaan terpadu pada dasarnya adalah polarisasi dari berbagai kegiatan yang mempunyai tujuan/muara sasaran yang sama. Untuk itu yang penting adalah penyatuan perencanaan terpadu, tepat dan terarah untuk mencapai sasaran dan tujuan secara efektif dan efisien.

c. Hambatan struktural dalam intern koordinasi. Hal ini sering terjadi bahwa dalam perencanaan terpadu belum dapat dilaksanakan, disebabkan oleh karena belum adanya perumusan tugas, wewenang dan tanggung jawab dari setiap unit kerja secara rinci.

d. Hambatan fungsional pelaksanaan koordinasi perencanaan operasional penerangan yang disebabkan karena antara yang mengkoordinasi dan yang dikoordinasi tidak terdapat hubungan struktural atau hirarkhi.

2. Terbatasnya Pengetahuan dan Keterampilan Perencana

Sebagai seorang perencana kegiatan operasional penerangan tentunya harus mempunyai kemampuan dan wawasan yang luas mengenai pendekatan operasional berorientasi dan mengadaptasi pada sikap, tata nilai kehidupan masyarakat, yang mampu mengetahui tentang

hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan, namun kenyataannya para tenaga perencanaan masih kurang mengetahui unsur perencanaan antara lain:

- a. Menguasai permasalahan yang dikaitkan dengan sumber daya dan dana yang dapat diusahakan.
- b. Menguasai tujuan serta asaran yang akan dicapai.
- c. Memahami kebijaksanaan dan cara untuk mencapai tujuan.
- d. Mempunyai kemampuan menterjemahkan program dalam rencana kegiatan yang konkrit dan dapat dilaksanakan.
- e. Mengalokasikan waktu pencapaian tujuan.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, maka penulis berkesimpulan bahwa tenaga perencana, khususnya perencanaan operasional penerangan, baik yang berada di jajaran Kanwil Deppen Propinsi Sulawesi Selatan maupun yang ada pada masing-masing Instansi/Dinas/Lembaga Non Departemen di Tingkat Propinsi Sulawesi Selatan dirasa masih kurang atau terbatas. Keadaan yang demikian, tentunya merupakan salah satu faktor yang ikut mewarnai pengelolaan perencanaan terpadu dalam operasional penerangan.

3. Keterbatasan Sarana dan Fasilitas Kerja

a. Ditinjau dari segi Kuantitas

Ditinjau dari segi kuantitasnya, keadaan sarana dan prasarana operasional penerangan jajaran Kanwil Deppen Propinsi Sulawesi Selatan dianggap kurang memadai. Apabila kita lihat, dan bandingkan dengan sasaran khalayak masyarakat secara keseluruhan dan kondisi medan tugas yang cukup berat dan luas, maka keadaan sarana dan prasarana yang ada belum memadai untuk menunjang kelancaran tugas dan optimalisasi operasional.

b. Ditinjau dari Segi Kualitas

Dari segi kualitas sarana dan prasarana penerangan yang ada menunjukkan standar berada pada batas minimum, oleh karena sebagian besar merupakan pengadaan lama, sehingga mempengaruhi produktifitas penerangan disamping tidak terpenuhi efektifitas dan efisiensi. Hal tersebut dapat dilihat pada penggunaan suatu sarana yang memerlukan biaya yang tinggi, Mobil Unit Penerangan, Mobil panggung misalnya untuk operasionalnya memerlukan biaya yang cukup tinggi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

A. Kesimpulan

Sebagai akhir bahasan dari hasil penelitian ini adalah kesimpulan yang akan memuat hasil temuan penulis. Adapun kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut :

1. Sebelum perencanaan atau suatu program dibuat kantor Wilayah Departemen Penerangan RI Propinsi Sulawesi Selatan, terlebih dahulu dilakukan penelitian atau survai tentang keadaan dan masalah. Keadaan yang dimaksud adalah keadaan potensi dan kondisi Propinsi Sulawesi Selatan, baik secara geografis maupun secara demografis. Sedangkan yang dimaksud masalah adalah masalah yang dihadapi baik secara umum Propinsi Sulawesi Selatan maupun masalah intern Departemen Penerangan khususnya Kantor Wilayah Departemen Penerangan RI Propinsi Sulsel.
2. Dalam rangka penyusunan rencana/program, juga diharapkan masukan baik dari intern organisasi (Bagian dan atau Bidang yang ada di Kanwil Deppen RI. Propinsi Sulawesi Selatan) maupun dari instansi pemerintah dan swasta lainnya, namun hal ini tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan terutama masukan

dari luar yang sering disebut "Kerabat Kerja Deppen". Bako humas (Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat) yang diharapkan dapat membantu teratasinya keadaan ini ternyata juga belum dapat diharapkan banyak, karena beberapa faktor antara lain faktor dana, fasilitas kerja dan keterampilan serta etos kerja manusianya yang masih kurang memadai.

3. Sedangkan proses perencanaan dapat dinilai dengan baik karena telah dijadwalkan sedemikian rupa tahap atau langkah-langkah yang harus dilalui sampai perencanaan itu menjadi suatu keputusan Kanwil dalam satu masa perencanaan. Disamping itu juga telah diorganisir perencanaan itu sedemikian rupa sehingga perencanaan yang telah disusun oleh Kanwil Deppen Propinsi Sulawesi Selatan tahun ini (1990/1991) telah memenuhi syarat-syarat suatu perencanaan yaitu menjawab pertanyaan 5 W + 1 H. Telah ditentukan "Siapa" yang melaksanakan, apa tujuannya, mengapa dilaksanakan suatu kegiatan tertentu, bagaimana cara melaksanakannya (melalui media apa), berapa biayanya, darimana sumber biayanya, kapan dilaksanakan suatu kegiatan tertentu dan dimana dilaksanakan. Semua jelas telah dipaparkan oleh pihak Kanwil Deppen RI Propinsi Sulawesi Selatan. Hanya saja, dalam lampiran yang memuat secara ringkas 5 W + 1 H ini tidak dicantumkan siapa pelaksananya.

4. Bagian terakhir dari kesimpulan yang diperoleh adalah masalah-masalah yang dihadapi oleh Kanwil Deppen Propinsi Sulawesi Selatan, adalah kurangnya koordinasi dalam rangka penyusunan rencana terutama dari kerabat kerja Deppen, disamping itu terbatasnya pengetahuan dan keterampilan personal perencana. Masalah lain yang menghambat perencanaan terpadu ini adalah faktor keterbatasan sarana dan fasilitas kerja baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

B. Saran-Saran

Dari kesimpulan di atas kita dapat melihat beberapa kelebihan dan kekurangan proses perencanaan terpadu pada Kanwil Deppen Propinsi Sulawesi Selatan. Tentunya, yang kurang dapat diperbaiki dan yang baik ditingkatkan. Oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis memberikan saran-saran yang diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan pengembangan ilmu selanjutnya. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengambilan data dalam rangka perencanaan kiranya benar-benar sesuai dengan keadaan masyarakat.
2. Mencari metode-metode atau sistem baru untuk memperbaiki dan memperlancar koordinasi baik secara

intern Deppen maupun dengan kerabat kerja Deppen (Instansi Pemerintah dan Swasta), Bakohumas yang dibentuk dapat ditinjau kembali keberadaannya apakah masih efektif sebagai tempat berkumpulnya wakil-wakil kerabat kerja Deppen.

3. Personil perencana perlu ditingkat pengetahuan dan keterampilannya, melalui pendidikan formal, diklat, kursus-kursus, penataran, seminar dan sebagainya.
 4. Penyediaan dana dan fasilitas kerja dalam rangka perencanaan terpadu perlu diperhatikan agar hasil yang diperoleh dapat menyentuh masyarakat dan sesuai program pemerintah pada umumnya, seperti tempat kerja yang nyaman, tunjangan atau tambahan-tambahan imbalan bagi personil perencana perlu diperhatikan.
-

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Arifin, Anwar. 1982. *Strategi Komunikasi Sebuah Pengantar Ringkas*. Ujung Pandang: Lembaga Kajian Inovasi Indonesia.
- Firman, B. Aji dan Marten, Sirati. 1985. *Perencanaan dan Evaluasi*, Jakarta: Bina Aksara.
- Handayaniingrat, Soewarno. 1985. *Pengantar Ilmu Administrasi dan Study Management*, Jakarta: CV. Haji Masagung.
- Kootz, Harold, dkk. 1989. *Intisari Management*, Drs.A. Hasi Ali (Penerjemah), Jakarta: Bina Aksara.
- Kertopati, Ton. 1984. *Management Penerangan*, Jakarta : Binas Aksara.
- Manullang, M. 1985. *Dasar-Dasar Management*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mar'at. 1983. *Pemimpin dan Kepemimpinan*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Panglaykim, J. dan Hasil Tansil. 1981. *Manajemen Suatu Pengantar*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sarwoto. 1985. *Dasar-Dasar Organisasi dan Management*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Siagian, Sondang P., Dr, MPA. 1985. *Filsafat Administrasi*, Jakarta: PT. Gunung Agung.
- _____. 1982. *Administrasi Pembangunan*, Jakarta: CV. Haji Masagung.
- Sutarto. 1987. *Dasar-Dasar Organisasi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Soedjadi, FX. 1989. *Organisasi dan Methode, Penunjang Berhasilnya Proses Manajemen*, Jakarta: CV. Haji Masagung.
- Soeroto. 1986. *Strategi Pembangunan dan Perencanaan Tenaga Kerja*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Susanto, Astrid S. 1977. *Puspenmas Sebagai Dapur Informasi*, Sungguminasa: Temu Karya Puspenmas se-Indonesia.

Tjokroamijodjo, Bintoro. 1989. *Perencanaan Pembangunan*, Jakarta: CV. Haji Masagung.

Widjaya, A.W. 1987. *Perencanaan Sebagai Fungsi Manajemen*, Jakarta: PT. Bina Aksara.

B. Metode Penelitian

Amirin, Tatang M. 1986. *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: CV. Rajawali.

Nazir, M. 1985. *Metode Penelitian*, Jakarta Ghalia Indonesia.

Singarimbung, Masri dan Sofian Efendi. 1987. *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES.

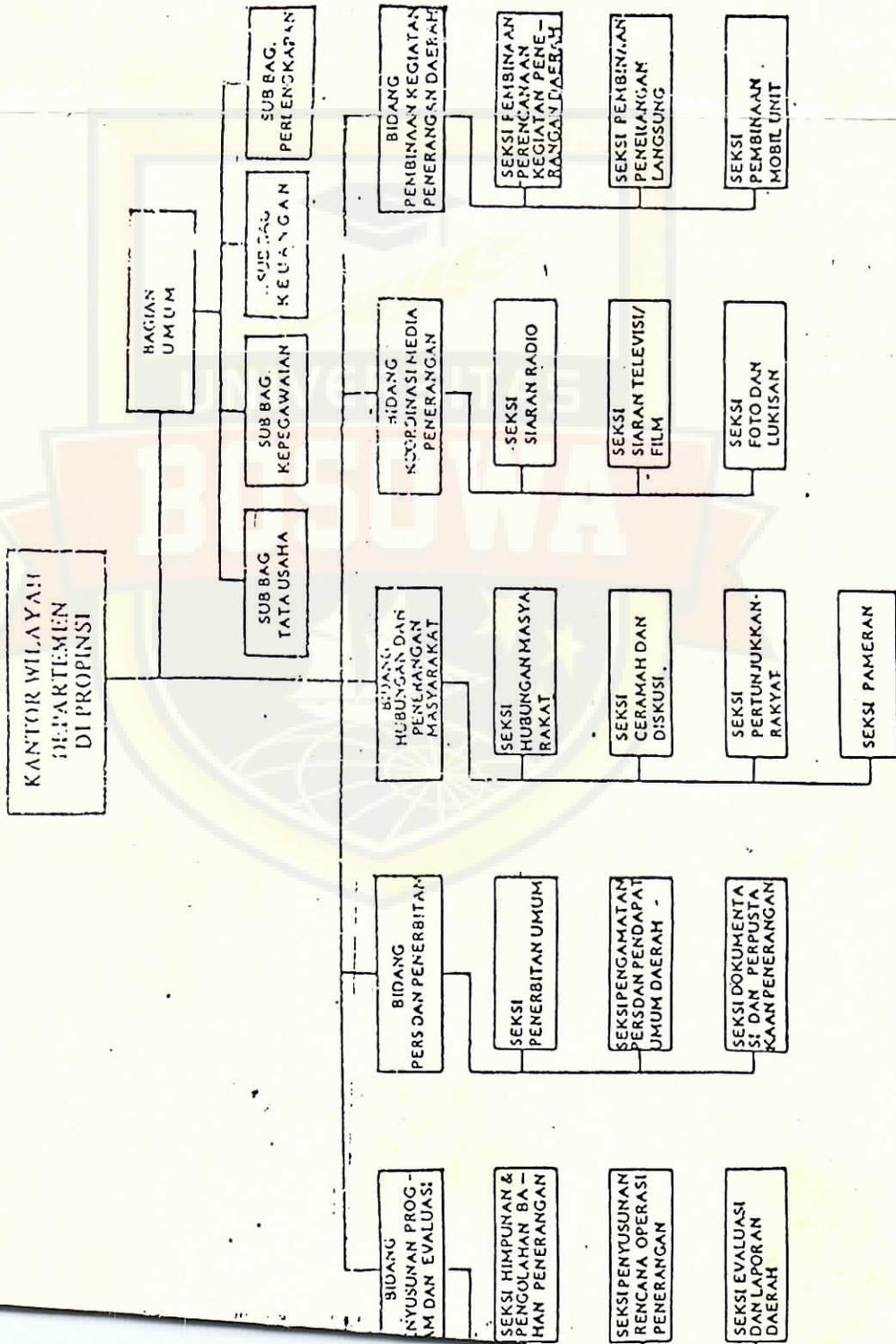
C. Dokumen-dokumen dan lain-lain

Bahan Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, UUD 1945, Garis-Garis Besar Haluan Negara, Jakarta: BP-7 Pusat.

Keputusan Menteri Penerangan No. 55 A/55 B/Kep/Menpen, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Penerangan, pendahuluan ayat 3.

Pedoman Penerangan 1983/1988, Jakarta: Departemen Penerangan Republik Indonesia.

STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENERANGAN RI
PROVINSI SULAWESI SELATAN



DEPARTEMEN PENERANGAN R.I.
KANTOR WILAYAH
PROPINSI SULAWESI SELATAN

anuddin No. 42 Telp. 22413-22503-21740-22973-3702 UJUNG PANDANG KODEPOS 90112

I N S T R U K S I

Nomor : 38 /Inst/SS/K/1989

t e n t a n g

PELAKSANAAN KETERPADUAN BIDANG PENERANGAN

Ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Penerangan Provinsi Sulsel,

Mengingat : a. bahwa semua unsur/unit kerja di lingkungan Kanwil Deppen Provinsi Sulsel dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi untuk terwujudnya kesatuan gerak yang serasi dalam setiap usaha/kegiatan penerangan ;

b. bahwa awal keterpaduan dimulai dari perencanaan operasional penerangan, yakni mencakup program kerja masing-masing unit kerja, dengan tujuan untuk mendapatkan daya-guna dan hasil-guna yang lebih tinggi atas kegiatan yang dioperasionalkan, baik yang menyangkut materi/isi, bentuk/gerak kegiatan maupun waktu/jadwal pelaksanaannya.

- Mengingat : 1. SK.Menpen Nomor 57/Kep/Menpen/1986 tentang Pedoman Pelaksanaan Keterpaduan Bidang Penerangan,
2. Instruksi Dirjen Penun Deppen RI Nomor 446 /Ditjenpenun/K/XII/1986 tentang Sistem Pelaporan & Target Operasional Penerangan,
3. SK.Menpen Nomor 148/Kep/Menpen/1988 tentang Pedoman Sistem Pelaporan Deppen RI
4. Surat Dirjen Penun Deppen RI Nomor 291/Ditjenpenun/K/XII/1988 tentang Program Kerja dan Laporan Tahunan;

M E N G I N S T R U K S I K A N

bertema, kepada para Kepala Bidang/Bagian di lingkungan Kanwil Deppen Provinsi Sulawesi Selatan, mulai 1 April 1989:

- a. Menyiapkan secara rutin setiap tahap penyusunan/pengolahan Program Kerja Tahunan, Triwulan, Bulanan, bahan-bahan masukan menurut tugas dan fungsi masing-masing unit/satuan kerja.
- b. Untuk Program Kerja Tahun 1989/1990, input data diterima paling lambat tgl.15 April 1989, untuk Program Kerja Triwulan I,II,III dan IV selambat-lambatnya diterima tgl.5 triwulan yang bersangkutan, dan Program Kerja Bulanan, diterima selambat-lambatnya tanggal 8 setiap bulan.

ditus,

Kedua, Untuk terwujudnya kesatuan gerak yang serasi, maka bahan-bahan masukan dalam rangka penyusunan program, mutlak dibahas secara hirarkhi antar Bagian - dengan Subbagian, dan antara Bidang dengan Seksi, yang pada akhirnya dibahas dalam Forum Konsultasi Kanwil Deppen Provinsi Sulsel.

Ketiga, menetapkan Bidang Penyusunan Program dan Evaluasi Kanwil Deppen Provinsi Sulsel sebagai pelaksana / penyelenggara forum konsultasi dimaksud, yang secara struktural mempunyai tugas untuk menyusun - rencana dan program secara menyeluruh serta melakukan evaluasi terhadap hasil-hasil yang dicapai oleh pelaksana penerangan.

Keempat, Instruksi ini disampaikan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagai upaya penegakan Panca Tertib Kantor Wilayah Departemen Penerangan Provinsi Sulawesi Selatan.-

Dikeluarkan di : Ujung Pandang
Pada tanggal : 1 April 1989

KANTOR WILAYAH DEPPEM PROVINSI
SULAWESI SELATAN,

K E P A L A,

MUHAMMAD JUSUF SAMAN, BA
NIP. 050003590